



EDUKASI KONSUMEN

Edisi Desember 2020

sikapiuangmu.ojk.go.id

**KON
TAK**

MEMBANGUN OPTIMISME JASA KEUANGAN INDONESIA

FOKUS PERBANKAN

Merger Bank Syariah BUMN
Jadi Momentum Bersejarah



KABAR OTORITAS

Pagelaran
Bulan Inklusi Keuangan 2020
Lampau Target





BUKU SERI LITERASI KEUANGAN TINGKAT PAUD

1. Yena dan Uang Hijau
2. Penghapus Rama
3. Olin Gemar Menabung
4. Ketika Lilo Piknik
5. Buku Panduan:
Menumbuhkan Kecakapan
Literasi Keuangan Pada Anak Usia Dini

Buku tersebut dapat di akses pada

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>



@sikapiuangmu

Optimisme Menyongsong 2021

Pandemi Covid-19 masih meradang. Di banyak negara beriklim subtropis, Covid-19 sudah memasuki gelombang kedua. Namun, penemuan vaksin dengan tingkat efektivitas hampir 100% membangkitkan sentimen positif. Jerman malah sudah mulai melakukan vaksinasi.

Aktivitas bisnis sudah mulai terjadi sejak awal November 2020. Presiden menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia telah melewati titik terendah setelah dihantam pandemi Covid-19 sepanjang tahun ini. Pada 2021 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8%- 5,8%, kembali positif setelah tumbuh negatif sepanjang semester kedua 2020. Ini berarti pertumbuhan usaha nasional diperkirakan akan menggeliat dan segera bangkit kembali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga, namun tetap dalam kewaspadaan mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Dengan penanganan Covid yang membaik dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian melalui berbagai stimulus Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK.

Tentunya berkat sinergi kebijakan empat serangkai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memainkan peranan penting dalam dukungan pada program pemulihan ekonomi nasional kita. Kementerian Keuangan meluncurkan Stimulus

Fiskal, Pemulihan Ekonomi Nasional (Subsidi Bunga dan Penempatan dana di Perbankan), Jaring Pengaman Sosial Bantuan Upah, dan Insentif Perpajakan.

OJK meluncurkan Restrukturisasi Kredit dan Penilaian kredit satu pilar, pelarangan *short selling*, *buy back* saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan *trading halt*, penundaan standar Basel 3 dan relaksasi pelaporan, serta digitalisasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Sektor Jasa Keuangan (SJK). OJK proaktif memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk pelaksanaannya di daerah dan memitigasi serta mencari solusi dari kendala yang di hadapi.

Sementara BI mengatur pelonggaran likuiditas melalui *Quantitative Easing*, menurunkan suku bunga BI7DRR menjadi 4%, pendanaan pembiayaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), dan Digitalisasi Sistem Pembayaran. Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif terjaga, pada September 2020 LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan.

Edukasi Konsumen edisi kali ini akan mengupas beberapa kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk Industri Jasa Keuangan (JK) semenjak pandemi Covid-19. OJK pun membuka peluang perpanjangan pelonggaran atau restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 hingga 2022. Selanjutnya, OJK meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk Industri Jasa Keuangan Non Bank melalui penerbitan POJK Nomor 44/POJK.05/2020.



Dewan Pelindung: **WIMBOH SANTOSO**
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat: **TIRTA SEGARA**
(Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
SARJITO (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli: **KRISTRIANTI PUJI RAHAYU** (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), **AGUS FAJRI ZAM** (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), **HORAS V.M. TARIHORAN** (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), **RELA GINTING** (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), **EDWIN NURHADI** (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), **BERNARD WIDJAJA** (Direktur Market Conduct) **SABAR WAHYONO** (Direktur Pelayanan Konsumen), **TRI HERDIANTO** (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen)

Redaktur: **ANUGRAH SUTEJO**
(Kepala Bagian Informasi)

Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

05 SOROTAN UTAMA

MEMUPUK OPTIMISME MENUJU 2021

Berkat sinergi kebijakan empat serangkai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga. Kondisi ekonomi pada 2021 diprediksi lebih baik dan kembali tumbuh positif. Namun ada syaratnya: masyarakat tetap harus waspada mengantisipasi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.



12 FOKUS PASAR MODAL

OJK dan BEI Dorong Ekonomi Syariah Lewat Literasi Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengenal investasi lewat program literasi Pasar Modal agar mampu mengelola keuangannya.



36

INSPIRASI

Adiwarman Azwar Karim Indonesia Merupakan Pasar Besar Industri Halal Global

Merupakan salah seorang pelopor ekonomi syariah, Adiwarman Azwar Karim dikenal dengan 3 pilar keuangan syariahnya. "Indonesia merupakan pasar besar untuk industri halal global," ujar penulis lima buku *best seller* ekonomi Islam ini.



10 PERSPEKTIF

TPAKD Award 2020

14 FOKUS PERBANKAN

Merger Bank Syariah BUMN Jadi Momentum Bersejarah

16 FOKUS GLOBAL

Indonesia Raih Peringkat Pertama Pasar Keuangan Syariah Global

18 INFO PASAR MODAL

Kolaborasi OJK dan BEI Lindungi Investor

20 INFO PERBANKAN

OJK Resmikan Aplikasi SIKEPO

21 INFO PERBANKAN

OJK Bersinergi dengan BUMDes dan Bank Wakaf Mikro

22 INFO IKNB

OJK Perketat Pengawasan Industri Asuransi

24 INFO IKNB

Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020 Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

26 REGULASI

Sempurnakan POJK Lama Tentang LJKNB, OJK Terbitkan POJK Baru

28 BISNIS PEMULA

Menjadi Miliarder Berkat Usaha Konten Kreator

30 INVESTASI

Strategi Investasi di Tengah Pandemi

32 TELAHAH PRODUK

BukuWarung Aplikasi Pembukuan Digital untuk UMKM

34 KONSUMEN BICARA

Mengenal SLIK OJK dan Manfaatnya

38 TOKOH

ADRIAN ASHARYANTO GUNADI, AFPI Ciptakan Layanan Keuangan Digital yang Inovatif

40 WAWASAN PERBANKAN

OJK Perpanjang Masa Restrukturisasi Kredit

41 WAWASAN IKNB

Menjadikan Hari Asuransi sebagai Momentum Industri Asuransi

42 WAWASAN PASAR MODAL

Mengenal Saham Go-Cap

43 KABAR OTORITAS

Pagelaran Bulan Inklusi Keuangan 2020 Lampau Target

46 ANGKA BICARA

Perkembangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

47 INSIGHT

Kian Kreatif di Tengah Pandemi

48 WACANA

Pentingnya Keamanan Digital dalam Inovasi Fintech

50 ARTIKEL

Resolusi Keuangan 2021 di Tengah Pandemi Covid-19



Memupuk Optimisme Menuju 2021

BERKAT SINERGI KEBIJAKAN EMPAT SERANGKAI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) YANG TERDIRI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), BANK INDONESIA (BI), DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM KONDISI STABIL DAN TERJAGA. KONDISI EKONOMI PADA 2021 DIPREDIKSI LEBIH BAIK DAN KEMBALI TUMBUH POSITIF. NAMUN ADA SYARATNYA: MASYARAKAT TETAP HARUS WASPADA MENGANTISIPASI TEKANAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19.



Menjelang tutup tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar gembira bagi kita semua. Merujuk kepada penilaian para pakar ekonomi, Presiden menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia telah melewati titik terendah setelah dihantam pandemi Covid-19 sepanjang tahun ini. Pada 2021 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8%-5,8%, kembali positif setelah tumbuh negatif sepanjang semester kedua 2020. Ini berarti pertumbuhan usaha nasional diperkirakan akan menggeliat dan segera bangkit kembali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pemulihan ekonomi akan berjalan pada kuartal kedua 2021. "Pemulihan ini diharapkan menyumbang pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 5%," ujarnya pada Webinar Kondisi Sektor Keuangan Terkini dan Prospek 2021, pada 10 November lalu.

Ia berharap mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat pada kuartal ketiga dapat terus terjaga.

Keyakinan untuk beraktivitas ini merupakan elemen penting untuk menggerakkan roda perekonomian.

Para ekonom juga memperkirakan stabilitas ekonomi makro pada 2021 terjaga dengan inflasi yang terkendali sesuai sasaran 2%-4%. Nilai tukar rupiah bergerak stabil dan berpotensi menguat. Neraca pembayaran akan surplus, didukung defisit transaksi berjalan yang rendah, di kisaran 1%-2% Produk Domestik Bruto (PDB).

Optimisme juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 bertema "Bersinergi membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi" yang disampaikan secara virtual pada 3 Desember lalu, Perry menyebut sejumlah faktor pendukung pertumbuhan ini. Di antaranya, peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, investasi portofolio, serta penanaman modal asing secara langsung.

"Aliran investasi diproyeksikan semakin deras sebagai respon positif terhadap Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertumbuhan ini di semua wilayah juga akan meningkat, khususnya di Jawa dan Wilayah Indonesia Timur, yakni Sulawesi, Maluku, dan Papua," ungkap Perry.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso juga melihat sinyal positif yang membangkitkan optimisme. "Saat ini sudah ada tanda-tanda pertumbuhan kredit," ujarnya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 12 Desember lalu.

Pada akhir 2020, menurut Wimboh, kredit diproyeksi tumbuh 2%-3%. Sementara pada 2021, kredit diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi lagi, yakni di kisaran 5%-6%. Wimboh mengakui, meskipun pertumbuhan kredit diproyeksi bakal meningkat, namun angka tersebut masih belum dapat dikatakan normal. Belum sepenuhnya pulih dibandingkan angka pertumbuhan sebelum pandemi.

“Memang prediksi 2021 belum sepenuhnya normal ke angka sebelum pandemi, namun angka pertumbuhan ini sudah dapat mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) yang diproyeksi tumbuh 5%,” katanya.

Pernyataan Wimboh sejalan dengan laporan *Office of Chief Economist Group Bank Mandiri* yang memprediksi ekonomi Indonesia kemungkinan baru akan membaik ke tingkat sebelum pandemi Covid-19 pada kuartal kedua 2021. Proyeksinya,

bunga, DPK pada 2021 masih tumbuh namun tidak sebesar pada 2020,” katanya.

Berbagai prediksi di atas membuat kita boleh sedikit mengendorkan ketegangan kita dan menabur optimisme. Berbagai pencapaian dan prediksi tersebut menunjukkan hasil kerja nyata sinergi kerja sama tiga lembaga yang mengatur masalah keuangan Indonesia: Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

nasional kita. Kementerian Keuangan meluncurkan Stimulus Fiskal, Pemulihan Ekonomi Nasional (Subsidi Bunga dan Penempatan dana di Perbankan), Jaring Pengaman Sosial Bantuan Upah, dan Insentif Perpajakan.

OJK meluncurkan Restrukturisasi Kredit dan Penilaian kredit satu pilar, pelarangan *short selling, buy back* saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan *trading halt*, penundaan standar Basel 3 dan relaksasi pelaporan,



pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15% pada periode tersebut.

Dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Wimboh memproyeksi pertumbuhan pada 2021 tidak akan sebesar tahun ini. Meskipun demikian, pertumbuhannya masih akan tergolong tinggi, yakni sekitar 10% plus minus 1% pada 2021. “Kami melihat ada kebijakan fiskal yang masih akomodatif. Dan menurut Gubernur BI masih ada ruang penurunan suku

Kebijakan OJK yang bersifat *pre-emptive, forward looking* dan *extraordinary* yang diperkuat sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terbukti mampu menopang lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Keempat lembaga yang bergabung di dalam KSSK ini memainkan peranan penting dalam dukungan pada program pemulihan ekonomi

serta digitalisasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Sektor Jasa Keuangan (SJK). OJK proaktif memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk pelaksanaannya di daerah dan memitigasi serta mencari solusi dari kendala yang di hadapi.

Sementara BI mengatur pelonggaran likuiditas melalui *Quantitative Easing*, menurunkan suku bunga BI7DRR menjadi 4%,

pendanaan pembiayaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), dan Digitalisasi Sistem Pembayaran.

Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif terjaga, pada September 2020 LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan. Tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing turun 25 bps menjadi 5% dan 7,5%. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing pada Bank Umum juga turun 25 bps menjadi 1,25%. LPS terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, hasil asesmen atas kondisi makro ekonomi, dan SSK.

Per September 2020, jumlah rekening simpanan yang dijamin LPS sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 335.311.847 rekening. Sementara itu, secara nominal jumlah simpanan yang dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan (maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank) mencapai Rp3.418,95 triliun.

Hasilnya terlihat pada infografis Dukungan Pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Restrukturisasi tersebut mampu menekan tingkat kredit macet (*non-performing loan, NPL*) sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan terus melanjutkan relaksasi restrukturisasi sinergi dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia ini.

Untuk mendorong pemulihan

ekonomi di daerah OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan proaktif memantau dan berkoordinasi baik di pusat maupun daerah melalui Kantor Regional atau Kantor OJK di daerah, sehingga OJK dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menopang perekonomian nasional.

Berbagai pencapaian yang menggembirakan di atas tentu saja bukan semata hasil kerja ketiga pendekar keuangan tadi. Tak kalah pentingnya adalah usaha semua pihak untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kerja sama Kementerian Kesehatan dan jajaran tenaga kesehatannya, Pemerintah Pusat dan Daerah, Satgas Covid-19, TNI dan kepolisian, serta banyak pihak

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kebijakan OJK yang bersifat *pre-emptive, forward looking* dan *extraordinary* yang diperkuat sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia menopang lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi covid 19. OJK proaktif memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk pelaksanaannya di daerah dan memitigasi serta mencari solusi dari kendala yang di hadapi.

<p>KEBIJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulus Fiskal • Pemulihan Ekonomi Nasional (Subsidi Bunga dan Peningkatan dana di Perbankan) • Jaring Pengaman Sosial • Bantuan Upah dan Insentif Perpajakan 	<p>KEBIJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi Kredit dan Penilaian kredit satu pilar • Pelebaran <i>short selling, buy back</i> saham tanpa RUPS dan perubahan <i>trading halt</i> • Penurunan standar basis 3 dan retaksasi pelaporan • Digitalisasi UMKM dan SJK 	<p>KEBIJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelonggaran likuiditas melalui <i>Quantitative Easing</i> • Penurunan Suku Bunga B7DRR menjadi 4% • Pendanaan pembiayaan APBN melalui pembelian SBN • Digitalisasi Sistem Pembayaran
---	---	---

o Akumulasi Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

<p>Perbankan</p> <p>Total Debitur 7,38Jt Rp884,5T</p> <p>UMKM 5,82Jt Debitur Rp360,6T Par 7 Sep 2020</p>	<p>Perusahaan Pembiayaan</p> <p>4,59Jt Kontrak Restrukturisasi 168,74T</p> <p>Par 22 Sep 2020</p>	<p>Bank Wakaf Mikro</p> <p>4,5M Par Agu 2020</p> <p>Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>26,4M Par Agu 2020</p>	<p>Restrukturisasi menekan tingkat NPL sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi sinergi dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.</p>
--	--	--	---

o Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penyaluran Kredit ke UMKM melalui Penempatan Dana Pemerintah pada Himbara dan BPD

HIMBARA (Per 14 September 2020)		OJK aktif memantau penempatan dana pemerintah ke perbankan baik bank HIMBARA maupun BPD. Berbagai stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit.
Penyaluran kredit 119,8T	Jumlah Debitur 1,5Jt	
BPD (Per 16 September 2020)		
Penyaluran kredit 7,4T	Jumlah Debitur 35,1 Ribu	

o Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah Mendorong Pemulihan Ekonomi di Daerah

OJK proaktif memantau dan koordinasi baik di pusat maupun daerah melalui kantor regional atau kantor OJK di daerah dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menopang perekonomian nasional melalui:

- 1** Pertemuan dengan Kepala Daerah, asosiasi dan pelaku usaha untuk mengatasi kendala dalam pemulihan ekonomi daerah
- 2** Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan program PEN.
- 3** Mendorong pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi UMKM.
- 4** Menciptakan sektor ekonomi unggulan dan mengentalkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentanir (Program K/PMR) yaitu kredit/pembiayaan dengan proses cepat, dan berbunga rendah kepada UMKM
- 5** Melakukan *business matching* pelaku UMKM dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

o Fokus Kebijakan Pemerintah dan OJK ke Depan

<p>Efektifitas Penanganan Pandemi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada efektifitas penanganan pandemi • Membuka aktifitas ekonomi bertahap dengan protokol kesehatan • Penerapan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment) untuk mencegah penyebaran 	<p>Penguatan Sektor Jasa Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan kebijakan relaksasi lanjutan • Konsolidasi industri jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing • Percepatan Adopsi Teknologi • Mempercepat reformasi IKMB dan Pasar Modal 	<p>Meningkatkan demand melalui dukungan sektor riil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan ekosistem digitalisasi keuangan • Menggerakkan ekonomi daerah dengan memperluas akses keuangan • Perpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi • Koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi dalam meningkatkan demand masyarakat • Sinergi dengan pemerintah untuk menggerakkan sektor korporasi dan konsumsi
--	---	--

terkait lainnya. Berbagai pihak ini telah bekerja keras menurunkan angka kejadian Covid-19.

Penanganan Covid-19 ini menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo menyatakan semua prediksi dan proyeksi optimis tadi hanya dapat diwujudkan jika kita semua menerapkan disiplin kesehatan ketika beraktivitas. "Hanya jika kita berdisiplin menjalankan prosedur kesehatan, kita bisa mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas lagi sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali, dunia usaha dapat

bergerak, dan ekonomi pulih kembali," kata Joko Widodo.

Joko Widodo mengajak semua pihak untuk fokus bergerak ke depan, sekaligus keluar dari pandemi. Caranya, antara lain dengan program vaksinasi dan menaati protokol kesehatan. Berhentinya kasus penularan Covid-19 ini akan memudahkan penerapan sejumlah kebijakan, mulai dari pembukaan sektor produktif, percepatan realisasi stimulus keuangan, serta peningkatan penyaluran kredit usaha.

"Kita harus bergerak cepat, karena masih banyak pekerjaan rumah yang

belum selesai. Kita dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat keputusan hubungan kerja pada selama pandemi. Kita menghadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan lapangan kerja," ujar Presiden Joko Widodo.

Syukurlah, pada awal 2021 pelaksanaan vaksinasi sudah dapat diterapkan secara meluas. Ditambah disiplin kita dalam menjalankan prosedur kesehatan di era kenormalan baru, kita semua berharap Indonesia mampu mengakselerasi dan memulihkan perekonomian kita.

危机

wei ji

Digitalisasi Jasa Keuangan & UMKM Melesat di Tengah Terpaan Pandemi

Dalam aksara Cina, kata krisis (*wei-ji*, 危机) merupakan perpaduan kata, yaitu 危 (*wei*) atau bahaya dan 机 (*ji*) yang berarti peluang atau kesempatan. Begitu pula, keterbatasan krisis karena pandemi Covid-19 telah mendorong kita

beradaptasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui penerapan digitalisasi di sektor jasa keuangan dan UMKM. Digitalisasi dilakukan untuk merespon perubahan gaya hidup masyarakat dan proses bisnis di berbagai sektor yang sudah

go digital. OJK juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Dukungan OJK dilakukan melalui empat langkah seperti pada infografis berikut.

DIGITALISASI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN UMKM

OJK mendorong Industri jasa keuangan adaptif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui digitalisasi. Digitalisasi dilakukan untuk merespon perubahan gaya hidup masyarakat dan proses bisnis di berbagai sektor yang sudah *go digital*. OJK juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Dukungan OJK dilakukan melalui:



1 Meningkatkan akses masyarakat kepada KUR secara digital. OJK bersama TPAKD Bali menginisiasi KURBALI.com sehingga masyarakat mengajukan dan mendapatkan informasi KUR dengan mudah



2 Digitalisasi UMKM

- 1 Memperluas jaringan pemasaran dengan marketplace dan BUMDes
- 2 Fasilitas nasabah BWM untuk memiliki rekening bank
- 3 Pembinaan nasabah BWM memanfaatkan platform digital

4 Cashless : pembayaran dengan QRIS

5 Memfasilitasi UMKM mitra untuk memperluas jaringan pemasarannya secara digital melalui platform: UMKM-MU



3 Percepatan digitalisasi di BPR dengan white labelling bekerja sama dengan Bank Himbara



4 Mendukung pemberian bansos non tunai untuk mendorong transaksi keuangan digital



TPAKD *Award* 2020

Bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK menyerahkan penghargaan kepada 10 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sejak tahun 2016, OJK bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menginisiasi program perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tahun ini, adalah kali pertama kegiatan Rakornas TPAKD diselenggarakan secara virtual, yang diselenggarakan pada 10 Desember 2020 dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan Youtube Live OJK. Kegiatan ini dihadiri oleh 224 TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.

Di acara tersebut, Presiden Joko Widodo meminta TPAKD untuk melakukan cara-cara *extraordinary* dalam memperluas akses keuangan di daerah.

Perkembangan inovasi program serta berbagai terobosan baru yang telah dilaksanakan oleh TPAKD tentunya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan inklusi keuangan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso memberikan penghargaan kepada 10 TPAKD dengan performa serta realisasi pencapaian program TPAKD terbaik, yang dilakukan sepanjang tahun 2019.

Para penerima TPAKD Award diharapkan bisa menjadi contoh bagi TPAKD lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program inklusi keuangan yang inovatif dan aplikatif dan tetap menekankan fokus pada pemberdayaan sektor unggulan daerah.

Seluruh program kerja yang telah diimplementasikan oleh para penerima TPAKD Award tahun 2020 tentunya dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh TPAKD lainnya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya pelaksanaan TPAKD Award tahun 2020, diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh anggota TPAKD

dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui percepatan akses keuangan daerah.

OJK beserta pemangku kepentingan terkait tentunya akan terus meningkatkan peran TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal

di daerah guna pemerataan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

10 TPAKD Penerima TPAKD Award 2020

Proses penilaian TPAKD Award dilakukan oleh Tim Penilai Utama yang terdiri dari perwakilan OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi dan World Bank. Setelah dilakukan penilaian kepada 68 TPAKD eksisting dan 23 TPAKD pendatang baru. TPAKD Award 2020 diberikan kepada 4 TPAKD Tingkat Provinsi, 4 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota dan 2 TPAKD sebagai pendatang baru, yakni:

TPAKD Tingkat Provinsi:

- TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik.
- TPAKD Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik.
- TPAKD Provinsi Jambi - Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik.
- TPAKD Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.

TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota

- TPAKD Kota Malang - Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
- TPAKD Kabupaten Kebumen - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM.
- TPAKD Kabupaten Kerinci - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik.
- TPAKD Kabupaten Langkat - Kabupaten/Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.

TPAKD Pendatang Baru

- TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik.
- TPAKD Kabupaten Purbalingga - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik.



OJK dan BEI Dorong Ekonomi Syariah Lewat Literasi Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengenal investasi lewat program literasi pasar modal agar mampu mengelola keuangannya.

Di tengah krisis pandemi Covid-19 yang memukul hampir semua sektor sejak Maret lalu, kinerja keuangan syariah di Indonesia justru menunjukkan perkembangannya, bahkan tumbuh pesat di berbagai sektor.

Kementerian Keuangan dan OJK mencatat, aset Industri Keuangan Syariah menembus Rp1.639,06 triliun per Juli lalu. Nilai ini terdiri atas aset sektor perbankan syariah Rp542,82 triliun, Industri Keuangan Non Bank

(IKNB) syariah Rp110,29 triliun, dan Pasar Modal Syariah (PMS) Rp985,95 triliun. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena potensi ekonomi syariah Indonesia memang luar biasa besar.

Di sisi lain, potensi ini juga belum banyak digarap, sehingga masih tertinggal dengan negara tetangga di ASEAN yang ekonominya lebih kecil, seperti Malaysia. Aset keuangan syariah negeri jiran itu sudah menembus USD541 miliar atau

terbesar ketiga di dunia tahun 2018, setelah Iran dan Arab Saudi. Berikutnya adalah Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Indonesia di posisi keenam, dengan aset USD86 miliar.

Padahal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sistem ekonomi syariah besar. Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah Indonesia adalah literasi pasar modal yang dilakukan BEI. Literasi menjadi ujung tombak untuk memperbesar ekosistem, industri, dan investasi berbasis syariah. Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, mengatakan literasi jadi komponen penting sehingga tidak boleh putus meski di masa pandemi. "Seperti OJK, pencapaian program literasi kami di BEI malah lebih tinggi di masa pandemi ini dibanding tahun lalu, dengan menggunakan sarana teknologi virtual," kata Hasan.

Progresnya terlihat pada perkembangan literasi PMS yang membawa hasil signifikan dalam empat tahun terakhir. Bahkan, jumlah investor saham syariah di Indonesia tumbuh 20% selama pandemi. Ternyata hikmah di balik imbauan pemerintah agar berkegiatan di rumah saja saat pandemi mampu meningkatkan efektivitas program edukasi *online* PMS dengan memanfaatkan teknologi yang dimaksud Hasan tadi. Hasilnya, per Agustus 2020, investor saham syariah telah mencapai 78.199 investor atau sekitar 5,9% dari total investor saham di Indonesia. Dengan demikian, saham syariah telah mencapai 63% dari saham yang tercatat di pasar modal Indonesia.

Menurut Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI, Irwan Abdalloh, pertumbuhan investasi ini dilatarbelakangi kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi untuk jangka panjang demi memajukan ekonomi dan pendapatan. "Masyarakat mulai paham bahwa membelanjakan uang untuk investasi lebih bermanfaat

daripada membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang belum tentu dibutuhkan," ujar Irwan.

Untuk mempercepat akses perluasan literasi dan inklusi PMS, BEI bekerja sama dengan berbagai komunitas. Dalam hal ini, BEI

“
Seperti OJK,
pencapaian
dari program
literasi kami
di BEI malah
lebih tinggi di
masa pandemi
ini dibanding
tahun lalu,
dengan
menggunakan
sarana
teknologi
virtual
”

menjalankan tiga kegiatan inti dalam program literasinya yakni membuka sekolah PMS yang bertujuan menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi, membuka kelas

workshop PMS bagi masyarakat yang tertarik menjadi investor, dan menggerakkan para investor untuk lebih aktif lagi dalam bertransaksi saham syariah, baik secara rutin maupun insidental.

Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik tahun 2018 jumlah generasi milenial mencapai 50,36% dari 67% total penduduk usia produktif. Mereka dianggap akan menjadi motor penggerak Indonesia beberapa tahun ke depan. Namun, menurut Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadilah Kartikasari, generasi milenial ini belum melek investasi. "Mereka belum berorientasi pada investasi. Sedikit dari mereka yang berinvestasi, itupun hanya sekali dalam satu hingga dua tahun," ujarnya.

Masyarakat golongan ini, lanjut Fadilah, dihadapkan pada tantangan gaya hidup yang tidak mudah di masa mendatang. Misalnya sistem pembayaran nontunai, kemudahan fasilitas kredit dan pinjaman daring yang dikhawatirkan dapat memicu budaya konsumtif, bahkan menghambat pengelolaan keuangan jangka panjang. Karena itulah program literasi PMS ini menjadi sangat penting. OJK pun ikut membantu BEI mewujudkan masyarakat yang sadar investasi.

"Kita semua harus bahu-membahu membantu generasi penerus kita, agar tidak hanya berkecukupan pada perkembangan teknologi saja, namun juga punya kemampuan mengelola keuangan untuk masa depan," ujar Fadilah.

Selain literasi PMS, BEI juga menciptakan empat strategi lain dari lima strategi yang sudah dicanangkan untuk lima tahun ke depan. Adapun empat strategi tersebut adalah program pengembangan infrastruktur PMS, program pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah, program penguatan sinergi, dan program pengembangan efek dan instrumen syariah.



Merger Bank Syariah BUMN Jadi Momentum Bersejarah

LANGKAH CERDAS DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN BUMN UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI SYARIAH, YAKNI DENGAN MELAKUKAN MERGER BANK SYARIAH BUMN. MERGER BEBERAPA BANK SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH NASIONAL TERBESAR DIHARAPKAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ORANG BANYAK.

Proses merger tiga bank syariah BUMN yakni Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi angin segar bagi pengembangan ekosistem industri syariah di Indonesia.

Pengamat Politik dan Ekonomi Islam Muhammad Najib mengatakan upaya Menteri BUMN, Erick Thohir menggabungkan bank syariah BUMN

ke dalam satu perbankan syariah merupakan momentum bersejarah. Menurutnya, Erick telah mengambil keputusan besar atas penggabungan Bank Syariah BUMN itu, hal ini merupakan tonggak sejarah ke-2 dalam upaya meningkatkan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Kementerian BUMN pun akan terus mengawal tidak hanya sampai

legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Najib menambahkan, selama ini masyarakat ekonomi kecil dan menengah sangat terbantu oleh

adanya bank syariah, termasuk kelompok santri yang masih enggan menyimpan uangnya di bank konvensional. Bank syariah juga diyakini memiliki daya tahan dari sejumlah ancaman krisis ekonomi yang akhir-akhir ini mengancam sejumlah bank konvensional.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Arief Rosyid juga menilai penggabungan atau merger tiga bank BUMN syariah akan memperkuat posisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. "Langkah yang diambil Erick Thohir selaku Menteri BUMN tepat dan membawa angin segar untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, mengingat sekitar 70 persen kegiatan ekonomi dan keuangan syariah saat ini masih berpusat di perbankan syariah," katanya.

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina Handi Risza pun memberi tanggapan. Proses merger ini merupakan gagasan lama yang mulai diwujudkan setelah ketiga bank syariah tersebut menandatangani *Conditional Merger Agreement (CMA)*. "Penggabungan tiga bank syariah ini bisa menghasilkan satu bank syariah besar agar bisa menjadi tuan rumah di tengah populasi muslim yang besar di Indonesia," ujar Handi.

Menurut dia, proses merger tersebut bisa membentuk bank syariah dengan permodalan dan aset yang lebih besar untuk bisa membiayai industri halal yang tengah berkembang di Indonesia. Handi menilai industri halal seperti pariwisata halal, *fashion* syariah, dan makanan minuman halal sedang tumbuh dan membutuhkan

pembiayaan besar yang berasal dari bank syariah.

Sementara itu, Ketua Tim Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hery Gunardi mengatakan tujuan merger tiga bank syariah ini agar Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki bank syariah yang besar dan berdaya saing di tingkat global.

Selain itu, proses merger ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Setelah proses legal merger selesai pada kuartal pertama 2021 mendatang, maka bank syariah hasil merger ini akan memiliki total aset Rp220-225 triliun dan menempati

posisi 7 perbankan terbesar di Indonesia. Sedangkan empat tahun pasca merger, diproyeksikan aset bank hasil merger akan jadi Rp390 triliun atau tumbuh 73,3% pada 2025. Pertumbuhan aset ini seiring dengan pembiayaan yang akan mencapai Rp272 triliun dan penghimpunan dana senilai Rp335 triliun pada 2025.

Bank hasil merger ini akan memiliki produk perbankan yang beragam dan didukung kemampuan teknologi yang baik serta jaringan yang luas dengan lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia.

Dengan penggabungan itu diharapkan tercipta bank syariah nasional terbesar di dunia yang mampu mendorong tujuan ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan bagi umat Islam di Indonesia.





Indonesia Raih Peringkat Pertama Pasar Keuangan Syariah Global

Di tengah hantaman krisis, Indonesia berhasil mencetak prestasi memuaskan di sektor ekonomi syariah. *Global Islamic Finance Report* menempatkan Indonesia di posisi pertama sebagai negara dengan pasar keuangan syariah global terbaik.

Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara dengan pasar keuangan syariah global terbaik. Dalam laporan *Global Islamic Finance Report* (GIFR), Indonesia mencatat

skor 81,93 pada *Islamic Finance Country Index* (IFCI) 2019. Berhasil menduduki posisi teratas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia berkembang sangat pesat.

Sebelumnya, pada 2018, Indonesia berada di urutan keenam dunia.

Selain GIFR, lembaga penilaian sistem ekonomi syariah lainnya seperti *Global Islamic Economy Indicator*

(GIEI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5, *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) 2019 memosisikan Indonesia di urutan ke-4, dan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2019 memberi gelar pada Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 229 juta orang atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Prestasi tersebut menyadarkan Pemerintah bahwa terdapat potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah.

“

**Prestasi ini
selayaknya
menumbuhkan
optimisme
untuk
mewujudkan
cita-cita kita
sebagai kiblat
keuangan
syariah dunia**

”

- Wimboh Santoso -

Luasnya pasar keuangan syariah di Indonesia tercermin dari keberadaan 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, 163 bank perkreditan rakyat syariah, dan 4.500 lembaga keuangan mikro syariah di seluruh Indonesia.

Kontribusi industri keuangan syariah terhadap industri keuangan nasional pun menunjukkan tren yang meningkat. Sektor yang paling besar menyumbang pertumbuhan aset keuangan syariah adalah pasar modal syariah, yakni mencapai 56,2%. Kemudian disusul perbankan syariah (6,3%) dan industri keuangan non bank syariah (7,5%). Hingga Juni 2020, aset perbankan syariah telah mencapai Rp545,39 triliun atau tumbuh 9,22% *year on year* (yoy).

Menanggapi itu, pengamat ekonomi *Center of Reform on Economics* (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, prestasi tersebut patut disyukuri. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil memperbaiki peringkat ekonomi syariah di tingkat global. “Hal ini harus kita syukuri. Kita mendapatkan peringkat yang begitu baik, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi,” ujar Piter.

Hal senada diungkap peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Nailu Huda. Ia bersyukur atas prestasi yang diraih tersebut. Menurutnya prestasi ini didapat karena perkembangan peraturan mengenai industri keuangan syariah di Indonesia cukup baik. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, capaian ini sangat layak. “Potensi Indonesia besar. Terlebih pemerintah juga aktif dalam perbaikan peraturan dan produk-produk syariah, seperti SUKUK dan lainnya,” kata Huda.

Joko Widodo mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain, seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. “Indonesia harus menangkap peluang ini dengan mendorong percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional. Sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti peluang besar tersebut. Saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sudah terbentuk sebagai perwujudan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal itu, di antaranya penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah juga sedang menyiapkan skema kebijakan untuk pemulihan ekonomi dan keuangan syariah yang terdampak pandemi Covid-19, sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara menyeluruh.

Potensi untuk membesarkan ekonomi syariah Indonesia juga diungkap oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso. “Prestasi ini selayaknya menumbuhkan optimisme untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai kiblat keuangan syariah dunia,” kata Wimboh Santoso.

Kolaborasi OJK dan BEI Lindungi Investor

OJK bersama BEI terus memberikan edukasi mengenai perlindungan investor. Akan ada papan khusus untuk mengakomodasi perpindahan saham papan atas yang turun kelas dan diawasi otoritas.





Sebagai regulator dan pengawas keberadaan OJK menjadi penting untuk melindungi investor. OJK-lah yang menetapkan aturan main yang mendahulukan kepentingan investor dalam bertransaksi, mengoptimalkan aktivitas pengawasan terhadap kegiatan pasar dan pihak-pihak yang perannya terkait langsung dengan perlindungan investor, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

Bentuk perlindungan terpenting bagi investor adalah tegaknya prinsip keterbukaan yang berpengaruh terhadap keputusan investasi mereka. Selain itu juga ada pemberian izin secara selektif untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, termasuk penerbitan aturan berikut aspek pengawasan atas tingkat kepatuhan pihak-pihak tersebut terhadap aturan yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia dan meningkatkan perlindungan investor, OJK telah menyiapkan beberapa kebijakan. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, pihaknya mengapresiasi keberhasilan *Self Regulatory Organization* (SRO) dalam meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Saat ini, sudah ada tiga juta *Single Investor Identification* (SID). Bahkan, di masa pandemi ini jumlah investor semakin stabil.

Maka dari itu, OJK akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan BEI, dalam mewujudkan industri pasar modal yang berdaya tahan, efisien, transparan, dan kredibel melalui berbagai kebijakan strategis pengembangan pasar modal.

Untuk memberikan perlindungan bagi investor maupun calon investor, OJK, BEI, serta SRO lainnya bersiap mengembangkan papan khusus untuk mengakomodasi perpindahan saham papan atas yang mengalami penurunan kelas dan perlu mendapatkan pengawasan dari otoritas.

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi menjelaskan papan khusus ini bakal bisa diaplikasikan tahun ini dengan menggunakan sistem perdagangan *periodic call auction*. Sistem ini mengumpulkan terlebih dahulu penjual maupun pembeli, dan transaksi dilakukan dengan interval tertentu. Ini berbeda dengan *continuous auction* yang transaksi dilakukan secara berkesinambungan.

Langkah tersebut untuk melengkapi kebijakan notasi khusus yang disematkan kepada emiten yang memiliki isu baik sisi kepatuhan maupun emiten yang mendapatkan perhatian khusus. Ke depan, OJK menekankan pentingnya adanya *market maker* untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, dan mempersempit celah untuk menggoreng saham sehingga pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel.

Diharapkan kebijakan di pasar modal ini dapat membangun

ekosistem pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan bisa melindungi dan membangun kepercayaan investor serta pelaku industri pasar modal Indonesia.

OJK terus merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan pasar modal Indonesia yang kuat. Dengan hal ini, OJK berharap pasar modal berperan signifikan dalam menyediakan pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya soal papan khusus dan pentingnya *market maker*, OJK bekerja sama dengan BEI dan industri pasar modal juga berpartisipasi dalam kampanye *World Investor Week* (WIW) 2020 yang diselenggarakan oleh *International Organization of Securities Commission* (IOSCO) *Committee 8* (C8) sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi investor maupun calon investor.

WIW merupakan kegiatan rutin tahunan berupa kampanye global pentingnya pelaksanaan edukasi dan perlindungan investor yang dilaksanakan pada tanggal 5-11 Oktober 2020 dan diikuti serentak oleh negara-negara anggota IOSCO C8. Kampanye WIW 2020 kali ini diselenggarakan melalui berbagai bentuk kegiatan *online*, seperti webinar, edukasi melalui Instagram *Live*, edukasi melalui artikel di *website* dan media sosial, serta sekolah pasar modal. Total kegiatan yang dilakukan adalah sebanyak 51 kegiatan dengan total partisipan sebanyak 23.377 peserta.

OJK Resmikan Aplikasi SIKePO

OJK meluncurkan aplikasi Seluler Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO) untuk mempermudah pelaku industri perbankan. Dalam bentuk aplikasi telepon pintar kini SIKePO hadir bisa dibuka kapan pun dan di mana pun.

Pelaku industri perbankan kini kian mudah mengakses semua aturan di industri perbankan lewat aplikasi SIKePO. Aplikasi berbasis ponsel pintar ini diluncurkan pada awal September 2020 lalu, sebagai pengganti *website* SIKePO yang hadir sejak 2014.

SIKePO merupakan sistem informasi yang memuat berbagai ketentuan yang terkait dunia perbankan. Pencarian aturan bisa dilakukan berdasarkan jenis, nomor atau tahun terbit ketentuan. SIKePO juga dilengkapi dengan fitur kodefikasi, pencarian, rekam jejak, ringkasan

aturan, infografis, ringkasan eksekutif, tanya jawab, dan materi sosialisasi ketentuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menjelaskan ide awal OJK mengembangkan SIKePO lantaran jumlah regulasi di industri perbankan sangat banyak. Bahkan aturan tersebut terkadang tumpang tindih dengan sektor lain sehingga membuat pelaku industri perbankan semakin sulit memahami ketentuan yang dikeluarkan regulator.

Menurut Heru kondisi itu menyulitkan *stakeholder* di perbankan memahami ketentuan yang ada dalam menjalankan usahanya. "Padahal semakin tinggi tingkat pelanggaran, *regulatory cost* semakin naik," tuturnya. Sejak 2019 OJK sudah mengidentifikasi pelanggaran di perbankan. "Memang ada yang bersifat penghindaran, tetapi lebih banyak terjadi karena ketidappahaman karena *overlap* dengan aturan yang lain," lanjutnya.

Melihat hal itu, OJK menyadari pentingnya kemudahan bagi para pelaku industri perbankan dalam mengetahui dan memahami aturan perbankan. Pada 2014, OJK melakukan kodefikasi semua aturan perbankan yang dituangkan ke dalam sistem berbasis *website* yang dinamai SIKePO.

Untuk semakin memudahkan *stakeholder* mengakses informasi, *website* SIKePO kemudian dikembangkan menjadi aplikasi *smartphone* yang diluncurkan di awal tahun, namun baru diresmikan September lalu. Hingga kini, aplikasi SIKePO sudah memiliki *user* sebanyak 1,4 juta dengan 4 juta akses.



OJK Bersinergi dengan BUMDes dan Bank Wakaf Mikro

OJK tengah fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu OJK kian gencar mengembangkan BUMDes dan menggaet Bank Wakaf Mikro

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia dengan mendorong pengembangan akses keuangan di beberapa desa, khususnya di daerah tertinggal, untuk meningkatkan Usaha Menengah Kecil, dan Mikro (UMKM) desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan meningkatkan potensi ekonomi di daerah.

“Kami yakin masih banyak potensi-potensi di daerah untuk dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Potensi pertumbuhan ada di daerah untuk tumbuh lebih cepat lagi,” tutur Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Berbagai program telah dilakukan OJK untuk mendorong perluasan akses keuangan di daerah dan masyarakat atau usaha kecil dan ultra mikro. Salah satunya dengan menggaet Bank Wakaf Mikro (BWM), program Jaring, Laku Pandai, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), BUMDesa Center, dan *Pilot Project* KUR Klaster di berbagai daerah.

Tidak tanggung-tanggung, OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) karena

ada beberapa daerah yang merupakan kawasan transmigrasi penduduk.

Pembangunan BUMDes melalui program BUMDesa Center yang tercatat mulai Oktober lalu, sudah terbentuk 29 BUMDesa Center di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain itu, untuk membantu modal usaha masyarakat, OJK membuat program sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Program digitalisasi UMKM dengan membuat *go digital*



UMKM diberlakukan di masa kenormalan baru. Program ini nantinya akan membiasakan masyarakat untuk bertransaksi secara digital, dan didukung langsung BWM.

Selain itu, OJK juga bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Selama pandemi, OJK tetap melakukan rangkaian kegiatan edukasi keuangan secara virtual.

OJK Perketat Pengawasan Industri Asuransi

Banyaknya kasus gagal bayar dan rendahnya kinerja sejumlah perusahaan asuransi membuat OJK terus tingkatkan pengawasan industri asuransi. Tolok ukur keberhasilan tak lagi semata berdasarkan laporan keuangan, melainkan juga perlindungan konsumen.

Maraknya kasus asuransi gagal bayar ke nasabah, membuat OJK terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Sepanjang 2006 hingga 2019, OJK sebagai regulator telah mencabut izin 39 perusahaan asuransi dan reasuransi. Rinciannya, sebanyak 25 asuransi umum, 13 asuransi jiwa, dan 1 reasuransi. Pencabutan izin itu berkaitan dengan kesehatan keuangan dan penggabungan usaha.

“Sebagian besar pencabutan izin usaha tersebut karena kesehatan keuangan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan tata kelola perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan agar mampu terus tumbuh dan berkembang,” ujar Pengawas Eksekutif OJK, Rianto.

Menurut Rianto, OJK terus memantau kesehatan perusahaan yang tecermin dari *Risk Based Capital* (RBC) maupun modal inti. Bila tidak sesuai ketentuan, regulator akan melakukan

berbagai upaya agar memenuhinya. Saat ini, perusahaan asuransi yang memiliki masalah keuangan, diupayakan supaya menjadi sehat dengan masuk ke dalam pengawasan khusus di bagian pengawasan OJK Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Tata kelola perusahaan menjadi bagian yang paling disoroti OJK saat ini. Selain karena maraknya kasus gagal bayar perusahaan asuransi, hal tersebut kini menjadi salah satu unsur penting guna menilai tingkat kesehatan perusahaan. Pengukuran tingkat kesehatan dari laporan keuangan semata sudah mulai ditinggalkan, otoritas sebagai pengawas sekaligus memastikan perlindungan konsumen pada model bisnis perusahaan asuransi.

Saat ini, OJK terus memperketat pemberian izin bagi produk-produk baru yang akan dikeluarkan perusahaan asuransi. Dewan Komisiner Pengawas IKNB OJK,

Riswinandi, mengatakan pengawasan industri asuransi memang lebih ketinggalan jika dibanding industri perbankan. “Meski ada hubungan dengan internasional, tetapi jika dibanding dengan perbankan pengawasan terhadap industri asuransi kita masih ketinggalan,” papar Riswinandi.

Untuk itu, OJK akan membenahi aturan pengawasan perusahaan asuransi dengan merujuk aturan industri perbankan yang disesuaikan dengan industri perasuransian. “OJK akan terus menyempurnakan regulasi untuk memperketat pengawasan terhadap industri asuransi ini,” tutur Riswinandi. “Dari waktu ke waktu khususnya sejak 2018 dan sampai nanti lakukan transformasi IKNB,” lanjutnya.

Selain meningkatkan kualitas manajemen perusahaan asuransi, Riswinandi juga menilai edukasi pemegang polis juga masih rendah. Masih banyak nasabah yang tak



memahami risiko penempatan investasi dari asuransi yang dipegangnya, terutama risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi saat dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi tertentu.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pengawasan pada perusahaan asuransi, yakni rencana bisnis perusahaan, tingkat kesehatan, dan *concentration risk*. Ketentuan pengetatan ini tengah disiapkan oleh OJK. "OJK mendukung proses hukum yang ditetapkan kepada oknum pejabat yang terbukti menyelewengkan wewenang untuk tindakan merugikan tertentu," papar Riswinandi.

Rencana bisnis perusahaan yang disampaikan ke OJK nantinya akan

menjadi tolok ukur perizinan produk yang diterbitkan. OJK menilai ada produk-produk yang diterbitkan karena mengikuti animo masyarakat saja namun sebelumnya tidak masuk ke dalam rencana bisnis perusahaan asuransi. Hal ini dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk berinvestasi dengan nilai besar pada perusahaan terafiliasi sehingga risiko investasi menjadi lebih besar.

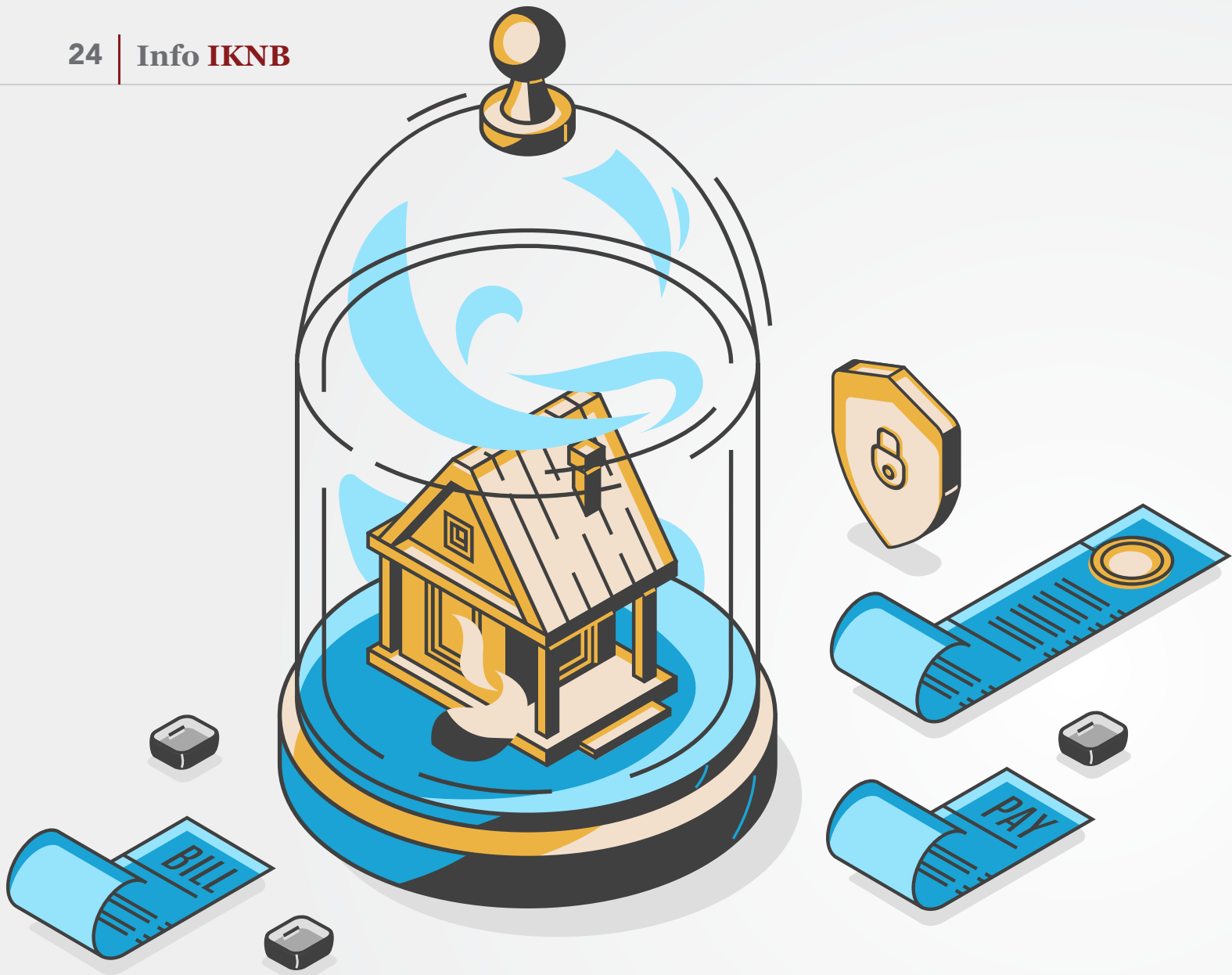
Hal seperti ini yang akan ditekan oleh OJK, karena berpotensi merugikan nasabah.

Hal seperti ini menurut Riswinandi tidak bisa lepas dari pengawasan terintegrasi. "OJK akan menolak produk yang dinilai tak sesuai dengan rencana bisnis perusahaan di tahun tersebut," ujarnya. "Namun

perusahaan mendapat kesempatan satu kali untuk merevisi rencana bisnisnya."

OJK tetap mendukung kelangsungan usaha perusahaan asuransi dengan memberikan sejumlah relaksasi agar tetap berproduksi saat pandemi Covid-19. Di antaranya penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dapat dilakukan secara virtual.

OJK juga mendorong agar perusahaan asuransi terus meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, baik dalam digitalisasi proses bisnis maupun bagi penggunaan di internal perusahaan.



Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020

Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Sukses menggelar acara virtual terbesar di Indonesia, Indonesia Fintech Summit (IFS) dan Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 menjadi upaya sinergi antara para pelaku industri fintech dan regulator, sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selama dua pekan pelaksanaan, IFS dan PFN 2020 melangsungkan 41 kegiatan webinar yang dihadiri oleh lebih dari 40 ribu peserta serta melibatkan lebih dari 180 pembicara dari regulator dan pelaku industri *fintech*. Kegiatan yang didukung oleh Bank Indonesia dan OJK ini sukses mencatat transaksi sebesar Rp4,6 Triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Nurhaida mengatakan, pencapaian ini merupakan suatu prestasi. Ke depannya, ia berharap apa yang dilakukan saat ini dapat membangun ekosistem yang lebih cepat di industri keuangan digital. Digitalisasi merupakan salah satu kunci sumber pertumbuhan ekonomi ke depan, IFS dan PFN 2020 merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pelaku industri *fintech* dan regulator terkait untuk bersama-sama saling mendukung, mengedukasi dan meliterasi keuangan digital kepada masyarakat.

"Kami akan terus mendorong perkembangan industri *fintech* di Tanah Air dengan menghadirkan layanan *online* bagi pelaku *fintech* yang ingin mendaftarkan perizinan ke OJK. Kami juga akan mengedepankan perlindungan konsumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," tambah Nurhaida.

Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. IFS dan PFN 2020 dapat menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah antara pelaku industri dan otoritas dalam percepatan transformasi digital ekonomi keuangan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengembangkan ekonomi keuangan digital, sistem

pembayaran dan inklusi keuangan, guna mendorong terciptanya efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, serta memajukan UMKM. Sinergi dan kerjasama berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendorong pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyambut baik hasil penyelenggaraan IFS dan PFN 2020. "Dari angka penggunaan layanan keuangan digital sebanyak 13,6 juta pengguna selama Pekan Fintech serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, kami optimis bahwa industri *fintech* nasional dapat memberikan kontribusi riil terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai pencapaian sepanjang Pekan Fintech juga menunjukkan partisipasi nyata dari industri terhadap pemulihan ekonomi nasional. AFTECH berharap momentum ini dapat mendorong kolaborasi industri dan pemerintah yang lebih erat guna mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan nasional," ujar Ketua Umum AFTECH, Niki Luhur.

Penyelenggaraan PFN 2020 saat ini dipandang sangat tepat waktu, sehingga dapat berkontribusi secara riil dalam percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Acara ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berbagai manfaat

dan risiko layanan *fintech*, serta variasi produk dan layanan yang ditawarkannya, baik bagi individu maupun bisnis seperti UMKM, yang mungkin selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

"OJK selalu mendukung dan menunjang pertumbuhan industri *fintech* tanah air melalui berbagai pengawasan dan pembinaan, seperti mengeluarkan regulasi terkait *fintech* yang mengutamakan perlindungan pelanggan serta penyedia layanan, tanpa menghambat ruang gerak inovasi," jelas Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Triyono Gani. Komitmen OJK ini terlihat dari sudah tercatatnya 161 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK hingga April 2020."

Kesuksesan acara PFN 2020 semakin meyakinkan bahwa *Digital Economic Activities* sudah sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan percepatan inovasi keuangan digital yang semakin digalakkan saat pandemi berlangsung untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.





Sempurnakan POJK Lama Tentang LJKNB, OJK Terbitkan POJK Baru

OJK terbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru dalam penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Melengkapi POJK yang lama, POJK ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik bagi LKJNB.

OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) POJK No.44/POJK.05/2020 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan POJK No. 1/POJK.05/2015 untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha LJKNB yang makin kompleks dan risiko yang dihadapi LJKNB.

Menurut pertimbangan OJK, POJK ini perlu direvisi sebab pengembangan LJKNB membutuhkan penerapan manajemen risiko yang lebih memadai, efektif, dan terukur. Di sisi lain, POJK No.1/POJK.05/2015 dinilai sudah tidak lagi menampung kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko LJKNB. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, bahwa pada POJK lama pelaku usaha wajib memitigasi risiko strategis, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, serta asuransi. Sementara pada POJK baru ditambahkan pengaturan mitigasi terhadap kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Menurutnya, pengawasan terhadap cakupan risiko itu harus dilakukan oleh pengawas aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Selain itu, perusahaan wajib menentukan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko lembaga keuangan non bank.

POJK yang baru ini otomatis mencabut POJK No. 1/POJK.05/2015, sedangkan peraturan pelaksana dari POJK No.1/POJK.05/2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody A.S. Dalimunthe, menyoroti poin tambahan di POJK baru

ini mengenai pengaturan risiko hukum dan risiko kepatuhan untuk mempertegas bahwa perusahaan harus memastikan adanya tata kelola yang baik. "Aturan lama POJK 1/2015, sudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum sementara manajemen risiko hukum harus ada karena terdapat potensi tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum di LJKNB," ungkap Dody. Lebih lanjut, menurut Dody tujuan akhir aturan baru ini agar seluruh aktivitas dan proses bisnis LJKNB termasuk asuransi dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi tertanggung tanpa ada tuntutan hukum dari seluruh *stakeholder*.

Berikut beberapa penyempurnaan aturan yang tertuang dalam POJK No.44/POJK.05/2020 yang diundangkan pada 2 September 2020.

Pertama, ketentuan pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah di mana LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, termasuk wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

Kedua, pengaturan dalam aspek kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko minimum kebijakan manajemen risiko LJKNB, prosedur manajemen risiko dan penerapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, dan penetapan risiko wajib dilakukan secara keseluruhan; per jenis risiko; serta per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Ketiga, pengaturan dalam aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. LJKNB wajib melakukan proses identifikasi,

pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material. Sistem informasi manajemen risiko juga wajib didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi manajemen risiko.

Keempat, pengaturan dalam aspek sistem pengendalian internal yang menyeluruh. LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB, ruang lingkup minimum pelaksanaan sistem pengenalan internal LJKNB, dan ruang lingkup minimum pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.

Kelima, LJKNB wajib membentuk komite manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko.

Keenam, fungsi manajemen risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pengendalian internal.

Ketujuh, LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB.

Kedelapan, beberapa ketentuan khusus dalam POJK No.44/POJK.05/2020, LJKNB menerapkan manajemen risiko terintegrasi. Fungsi manajemen risiko dapat digabung dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan. Sementara itu, penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabungkan dengan penerapan manajemen risiko pendirinya.

Kesembilan, penegakan kepatuhan atas POJK ini dapat berupa sanksi peringatan tertulis, penurunan hasil tingkat kesehatan, atau penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.



Menjadi Miliarder Berkat Usaha Konten Kreator

Era media sosial membuka peluang baru bagi orang-orang yang kreatif. 'No Body' dapat bersalin rupa menjadi selebgram dan *influencer* terkenal. Bahkan sejumlah pesohor pun terjun ke industri konten kreator di berbagai *platform* media sosial dan menjadikannya sumber pendapatan bernilai miliaran rupiah per bulan.

Sepuluh tahun lalu, siapa yang kenal Atta Halilintar, @riaricis1795 (Ria Ricis), dan Anya Geraldine? Tapi saat ini pertanyaan harus dibalik: siapa yang tak kenal mereka? paling tidak generasi milenial dan Gen Z? Bahkan sebuah video viral menggambarkan betapa anak SD lebih kenal Sule dan Atta Halilintar ketimbang para pahlawan nasional dan mantan Presiden. Miris memang, namun fenomena tersebut menggambarkan betapa kuatnya media sosial mencengkram perhatian dan benak generasi muda.

Bisnis konten kreator telah menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di era *new media* sekarang

ini. Apalagi di masa pandemi banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tren konsumsi media sosialnya pun semakin meningkat. Data *We Are Social Hootsuite* per Januari 2020 menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang, 162 juta di antaranya pengguna media sosial. Di pertengahan Februari 2020 rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 7 jam 59 menit per hari untuk beraktivitas di dunia maya. Statistik ini dipastikan membumbung tinggi di tengah situasi pandemi. Tren inilah yang membuat para pegiat media sosial semakin gencar meningkatkan konten media sosial mereka.

Pada awalnya para pegiat media sosial bukanlah figur publik yang aktif membangun *personal brand*-nya di media sosial, khususnya di *platform* YouTube atau Instagram sehingga disebut YouTuber atau Selebgram. Kita kenal nama-nama seperti Atta Halilintar (26 juta pengikut dan rata-rata 162,7 ribu pemirsa), Ria Ricis (22,9 juta pengikut dengan rata-rata 1,02 juta pemirsa), Arif Muhammad (10,9 juta pengikut dengan rata-rata 2,57 juta pemirsa), dan lain-lain. Namun belakangan para pesohor pun ikut terjun meramaikan *platform* ini – apalagi setelah panggung hiburan sepi akibat terdampak pandemi Covid-19. Nama-nama seperti Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula, 16,7 juta pengikut dengan rata-rata 1,37 juta pemirsa), Deddy Corbuzier (12,5 juta pengikut dengan rata-rata 3,57 juta pemirsa), dan Sule (6,59 juta pengikut dengan rata-rata 586 ribu pemirsa) semakin aktif meramaikan media sosial. Bahkan mereka saling berkolaborasi serta menabur hadiah (*giveaway*) besar untuk mendongkrak jumlah penonton dan pengikut mereka.

Uang yang diraup dari bisnis konten kreator ini terbilang besar.

Dengan jumlah pengikut dan pemirsa yang sangat besar, kanal-kanal ini dilirik para pemasang iklan dan sponsor yang berharap produknya dapat dilirik para *subscriber* kanal tersebut. Dengan jumlah pemirsa yang sangat besar, *CPM* (*Cost Per Mile*) atau nilai tarif per seribu pemirsa menjadi relatif rendah dan menggiurkan pemasang iklan dan sponsor. Tak heran jika kanal-kanal ini dikelola dengan sangat serius, dengan melibatkan tim kreatif dan pemasar profesional. Bahkan Baim dan Paula tak ragu melakukan perjalanan ke luar negeri demi berburu konten yang dapat mendongkrak pengikut dan pemirsa.

Yang menarik, meski peringkat tertinggi pengikut digenggam Atta Halilintar, namun kanal yang menghasilkan *cuan* tertinggi justru Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Situs Nox Influencer pada 7 November 2019 memperkirakan kanal Raffi-Gigi menghasilkan Rp2,14 miliar/bulan, sementara kanal Atta menghasilkan Rp1,81 miliar/bulan, diikuti Arif Muhammad (Rp1,56 miliar/bulan, Ria Ricis (Rp1,51 miliar/bulan), dan Raditya

Dika (Rp1,29 miliar/bulan). Tak heran jika banyak generasi milenial dan Gen Z yang tergiur menggeluti usaha ini.

Pendapatan yang lebih tinggi ini karena kanal-kanal tersebut dinilai bukan sekadar memiliki pemirsa (*reach*) yang besar, melainkan pemiliknya mampu menjadi *influencer* yang mendorong pemirsanya membeli apa yang mereka kenakan atau merekomendasikan. Selain itu, kanal-kanal ini juga memiliki *impressions* dan *engagement* yang tinggi. *Impression* mengacu pada akumulasi jumlah berapa kali *ads* atau konten Anda tampil di layar pengguna. Akumulasi jumlah *ads* atau konten ini bisa berasal dari unggahan yang dibagikan dan kinerja hasil pencarian melalui mesin pencari (*Search Engine Optimization*). Adapun *engagement* adalah respon khalayak terhadap unggahan, seperti menyukai, komentar, atau membagikannya kepada orang lain.

Nah, jika Anda yakin bisa menjadi *creativepreneur* yang baik, inilah saatnya terjun ke bisnis konten kreator ini.





Strategi Investasi di Tengah Pandemi

Pandemi Covid-19 menurunkan kinerja berbagai sektor industri domestik maupun global. Di tengah kelesuan ini, industri apa saja di Indonesia yang masih prospektif untuk berinvestasi yang menguntungkan?

Agar dapat meraih keuntungan, setiap kali akan berinvestasi, kita harus tahu lebih dulu apa sifat investasi kita:

jangka panjang atau jangka pendek. Sifat investasi ini akan menentukan pilihan instrumen investasi yang paling

tepat kita ambil. Pilihan instrumen investasi ini menjadi semakin krusial di tengah situasi pandemi ini, mengingat banyak bidang industri yang kinerjanya terganggu karena berbagai keterbatasan di tengah situasi pandemi ini.

Untuk melakukan investasi jangka pendek seperti memutar dana pendidikan anak, pilihlah investasi yang

berisiko rendah, seperti tabungan, deposito, dan obligasi. Ketika jenis investasi ini memang tidak menjanjikan perolehan (*capital gain*) yang tinggi, tapi dana Anda aman, tidak akan berkurang pada tanggal jatuh tempo. Dalam situasi yang agak sulit diprediksi ini, Anda harus cari aman. Apalagi dana yang diinvestasikan adalah dana yang sangat penting, yang tidak boleh hilang (*investment loss*).

Chief Investment Officer PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) Erik Argasetya mengingatkan masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur keuangannya. "Baik mereka yang telah aktif sebagai investor, lebih-lebih masyarakat awam yang belum akrab dengan aktivitas transaksi di pasar modal," ujarnya.

Erik merekomendasikan beberapa hal penting untuk Anda yang akan berinvestasi di tengah situasi pandemi ini. Pertama, tingkatkan dana darurat. Para ahli kesehatan memperkirakan diperlukan waktu panjang hingga pandemi mereda ke titik normal. Karena itu investor perlu mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk berjaga di rentang waktu sekitar 3-6 bulan ke depan. Dana darurat ini berupa uang tunai atau setara tunai yang dapat segera dicairkan alias likuid. Misalnya berupa tabungan, deposito, obligasi, atau reksa dana pasar uang.

Kedua, *portfolio review & rebalance*. Kaji portofolio investasi Anda secara berkala sesuai dengan tujuan investasi Anda. Ketika menentukan tujuan investasi di awal, alokasi aset ditentukan berdasarkan sejumlah pertanyaan tentang profil risiko investasi (*investment risk profiler*).

Namun, menurut Erik satu hal yang harus diingat adalah *risk profile* seorang investor dapat berubah sesuai dengan perubahan tujuan investasi, usia, kondisi keuangan, dan kondisi pasar – seperti yang terjadi saat ini. Karenanya investor pun direkomendasikan mengkaji dan menyeimbangkan kembali (*review dan*

rebalance) apakah portofolionya masih sesuai dengan kondisi saat ini.

Ketiga, perhatikan momentum investasi. Jika sudah melakukan *portfolio review & rebalancing* dan masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan, maka tidak ada salahnya untuk mulai dapat melakukan investasi berdasarkan momentum (*momentum investing*) yang ada. Menurunnya pasar saham membuat harga saham jatuh, menciptakan 'diskon besar-besaran' yang memberi banyak kesempatan bagi para investor untuk mulai membangun portofolionya.

Aksi beli, jika dilakukan secara tepat dengan modal pengetahuan yang cukup, akan sangat berpeluang memberikan keuntungan. Meskipun masih dilanda kekhawatiran, secara historis ada beberapa sektor yang cenderung bersifat defensif seperti sektor barang konsumsi dan kesehatan. Menariknya, karena adanya himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, maka ada beberapa emiten telekomunikasi yang dapat diuntungkan dengan tingginya permintaan paket data internet. Begitu pula, meningkatnya permintaan akan layanan rumah sakit dan obat-obatan serta vitamin dan suplemen membuat saham rumah sakit dan perusahaan farmasi semakin naik.

Dengan melihat kondisi pasar terkini, investor juga dapat

memanfaatkan situasi ini untuk membeli produk investasi berbasis saham karena harga saham yang rendah dan menahanya hingga kondisi pasar kembali membaik dan harga saham-sahamnya naik.

Keempat, *diversification is key in investing*. Jangan menyimpan telur dalam satu keranjang, kata pepatah. Saat ini banyak pilihan lain untuk berinvestasi selain di instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Karena itu variasikan portofolio investasi Anda dalam beberapa instrumen investasi yang berbeda. Jika salah satunya terpuruk, Anda tidak akan kehilangan segalanya.

Diversifikasi investasi melalui investasi alternatif yang marak ditawarkan oleh *platform-platform fintech*, misalnya seperti *Equity Crowdfunding (ECF)*, *Project Financing*, dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)* dapat menjadi pilihan diversifikasi yang baik bagi para investor.

Terakhir, jaga kesehatan diri masing-masing dan tingkatkan empati untuk membantu sesama. Masih banyak orang yang tidak terlalu beruntung untuk memiliki pilihan di masa isolasi seperti ini. Karenanya, memiliki empati dan saling membantu semampunya akan sangat baik untuk membesarkan hati mereka yang sedang kesulitan.



BukuWarung Aplikasi Pembukuan Digital untuk UMKM

Pembukuan keuangan yang baik dan sistematis bukan saja memudahkan pelaku bisnis mengelola usahanya, namun juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, pelanggan, dan perbankan.

Pembeli selalu ramai berbelanja, tapi kenapa kas kosong melompong? Lantas ke mana larinya uang masuk dari penjualan yang cukup laris itu? Fenomena seperti ini kerap terjadi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyebabnya, tak ada pembukuan sehingga arus kas keluar masuk tidak tercatat dengan baik.

Pencatatan dan pengelolaan keuangan memang merupakan salah satu fondasi pertumbuhan usaha. Seorang pengusaha harus mengetahui setiap pergerakan arus kas dan dapat mengontrol pengeluaran

uang sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih baik. Namun pada kenyataannya, hal ini belum optimal karena banyak pelaku usaha masih

menjalankan sistem pembukuan secara manual, tidak sistematis, dan tidak terintegrasi.

Pentingnya pembukuan dan manajemen keuangan ini menjadi semakin penting di era digital dan pemasaran daring kini, di mana transaksi maupun penerimaan uangnya bersifat virtual. Situasi inilah yang mendorong UMKM memanfaatkan *platform* daring untuk mencatat laporan keuangannya. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi BukuWarung, aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengusaha UMKM mengelola pembukuan usahanya secara digital.

Aplikasi ini memiliki fitur catat utang dan piutang, sehingga pemilik usaha dapat mencatat kewajibannya





kepada pihak ketiga (misalnya kepada pemasok), serta tagihan pembeli yang belum dibayarkan (pembelian kredit). Pemberitahuan tagihan akan disampaikan secara otomatis melalui SMS atau WhatsApp, sehingga pemilik usaha dapat menerima pembayaran utang lebih cepat.

Fitur lainnya adalah pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses per hari, minggu, atau bulan. Pelaku UMKM bisa memantau arus kas dengan mudah karena aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi, termasuk kredit, pengeluaran, dan penjualan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Saat ini, lebih dari 600.000 pedagang di 750 lokasi di Indonesia telah menggunakan aplikasi BukuWarung. Dengan desain sederhana dalam pencatatan

keuangan dan pembayaran digital, BukuWarung dapat digunakan dengan mudah oleh pelaku usaha yang memiliki ponsel sederhana (*low-end*), kapasitas penyimpanan sedikit, atau konektivitas data terbatas. Pencatatan transaksi pada aplikasi BukuWarung ini didukung oleh tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, bahkan oleh pemula. Hal ini tentu dapat memudahkan pengguna yang masih awam menggunakan teknologi.

Menggunakan aplikasi pembukuan digital terintegrasi ini bukan sekadar mampu mengelola laporan keuangan menjadi lebih baik, melainkan sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan. Penerapan aplikasi ini akan memudahkan pekerja dalam melayani pelanggan sehingga mampu memberikan layanan yang lebih maksimal dan profesional sehingga menambah kepuasan pelanggan.

Dengan berbasis sistem operasi Android yang dipasang di ponsel, pelaku usaha dengan mudah mengakses pembukuan dan laporan keuangan bisnis hanya dalam genggam tangan. Pengusaha dapat mengontrol laporan keuangannya setiap saat dari mana pun. Sistem aplikasi pembukuan akan menyimpan dan menyusun setiap rincian usaha sesuai dengan fitur yang ditawarkan sehingga membantu operasional usaha.

BukuWarung memiliki sistem dan *database* yang saling terhubung, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat dan rinci dalam waktu singkat. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai aplikasi kasir, sehingga catatan penjualan akan langsung masuk ke *database* serta pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Pengelolaan pembukuan keuangan yang rapi juga akan memudahkan pelaku UMKM melaporkan tagihan pajaknya di setiap tahun atau ketika harus berurusan dengan bank, misalnya dalam pengajuan kredit.

BukuWarung bukan satu-satunya aplikasi laporan keuangan digital yang tersedia gratis untuk UMKM. Masih ada sejumlah aplikasi lainnya, misalnya BukuKas, LunasBos, SIAPIK, Lamikro, dan Akuntansi Keuangan. Fitur-fitur yang ditawarkan pun lebih kurang sejenis. LunasBos, misalnya, menawarkan fitur pengingat utang yang tersinkronisasi di kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Dengan demikian baik jumlah maupun tanggal jatuh temponya sinkron di kedua pihak. Seperti juga aplikasi lainnya, catatannya juga secara digital di *cloud server* pengguna sehingga bisa diakses setiap saat dari mana saja. Dengan demikian pengusaha lebih bebas mengendalikan bisnisnya dari mana saja.



glints.com

Mengenal SLIK OJK dan Manfaatnya

Sejak awal 2018, layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang digunakan untuk Bank Indonesia (BI) *Checking* telah beralih menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK. Apa saja fungsi dan manfaatnya?

Mengapa ada orang yang dengan mudah mendapatkan pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, sebaliknya ada pula yang begitu susah bahkan ditolak berkali-kali? Salah satu faktor penentunya adalah catatan riwayat kredit nasabah-nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tersimpan dalam layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang disediakan Bank Indonesia sehingga populer disebut BI *checking*.

Sejak Januari 2018, layanan ini digantikan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK. Seiring diperkenalkannya SLIK pada awal 2018, Bank Indonesia (BI) tidak lagi melayani kegiatan operasional pengecekan data. "Peralihan tugas dan fungsi ini ke OJK ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2011," ungkap Feriyanti Nalora,

Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.

Pada dasarnya, SLIK OJK menawarkan fungsi yang sama dengan layanan BI *Checking* dengan SID-nya, yaitu menyediakan informasi debitur. Jika pada BI *Checking* informasi debitur ini disebut sebagai IDI (Informasi Debitur Individual) Historis, pada SLIK OJK, istilahnya menjadi iDeb (informasi debitur). Menurut Feriyanti, data yang bisa diakses juga tidak sebatas informasi mengenai perbankan saja. Inilah yang menjadi letak perbedaan BI *Checking* dengan SLIK. "Cakupan SLIK lebih luas dari SID, sebab pelapor SLIK tidak hanya dari industri perbankan, namun juga lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur), lembaga jasa keuangan

lainnya (pergadaian) dan lembaga lain bukan LJK (seperti koperasi)" tuturnya.

Koperasi yang berinisiatif ikut keanggotaan SLIK ini biasanya berfungsi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mereka butuh data tentang nasabah-nasabahnya.

Keberadaan SLIK OJK ini bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat maupun lembaga keuangan dalam melakukan transaksi keuangan. Bagi masyarakat adanya SLIK diharapkan dapat mempercepat waktu dalam mengurus persetujuan kredit. Khusus nasabah baru, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), SLIK akan memberi peluang lebih luas dalam mendapatkan akses pada pemberi kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengandalkan reputasi keuangan,

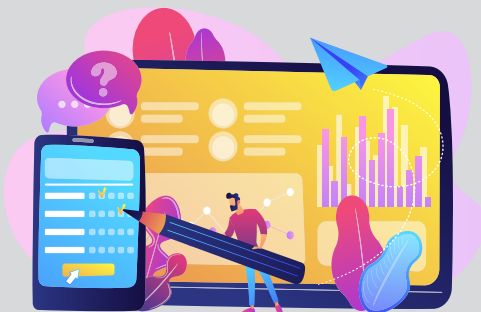
TATA CARA PENGAJUAN IDEB SLIK OJK



Debitur dapat meminta informasi debitur SLIK dengan cara mengisi formulir antrian *online* di <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>



Setelah mendapatkan persetujuan yang dikirimkan melalui email, Debitur menghubungi nomor WhatsApp OJK-SLIK yang tertera di email untuk dilakukan verifikasi data.



Setelah proses verifikasi, informasi Debitur SLIK akan disampaikan melalui email.

bukan sekadar agunan yang dimiliki. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mendorong penerima kredit untuk menjaga kredibilitasnya.

Di sisi lain, keberadaan SLIK juga sangat bermanfaat para pemberi kredit. Manfaat tersebut antara lain mempercepat proses analisis serta pengambilan keputusan untuk memberikan kredit. Data SLIK dapat menurunkan risiko kredit bermasalah. Selain itu, kedua pihak kini bisa beralih perlahan-lahan dari ketergantungan terhadap agunan konvensional. Data SLIK diharapkan dapat menentukan reputasi kredit calon debitur secara resmi.

SLIK memuat informasi setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit, lengkap dengan rapor catatan kreditnya. Status pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur diklasifikasikan sebagai kolektibilitas (kualitas kredit/pembiayaan). Kolektibilitas inilah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui pinjaman dana. Penentuan kolektibilitas mengacu pada ketentuan masing-masing jenis lembaga jasa keuangan.

Pada ketentuan Bank Umum, Kolektibilitas 1 adalah kolektibilitas terbaik di mana debitur sama sekali tidak pernah memiliki catatan menunggak kredit, baik angsuran pokok maupun angsuran bunga. Kolektibilitas 2, nasabah berstatus kredit DPK (Dalam Perhatian Khusus), artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1-90 hari. Kolektibilitas 3, kredit tidak lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91-120 hari. Kolektibilitas 4, kredit diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121-180 hari. Kolektibilitas 5, kredit macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih 180 hari.

Saat ini SLIK hanya menampilkan riwayat kredit hingga 2 tahun terakhir saja. Namun bukan berarti data tahun sebelumnya hilang. Melainkan dibutuhkan akses khusus dan terbatas jika ingin menelusuri riwayat yang lebih lampau. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan data SLIK ini dengan sebaik-baiknya. Ikutilah prosedur resmi dari OJK, jangan tergiur pihak-pihak yang ingin menawarkan informasi data SLIK selain jalur resmi, sebab layanan ini tidak dikenakan biaya dan tidak perlu perantara," ujar Feriyanti mengingatkan.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui catatan kreditnya bisa mengajukan iDeb ke OJK dengan mengunjungi gerai layanan yang tersedia. Namun, sejak terjadi pandemi, untuk sementara interaksi secara langsung ditiadakan sehingga akses informasi SLIK dilakukan secara *online*. Masyarakat bisa mengakses iDeb ke Gerai SLIK secara daring di situs yang tertera dalam infografis dengan mengikuti tata cara untuk melakukan registrasi. Informasi lebih rinci mengenai layanan informasi SLIK *online* dapat menghubungi Kontak OJK 157.

Adiwarman Azwar Karim

Indonesia Merupakan Pasar Besar Industri Halal Global

Merupakan salah seorang pelopor ekonomi syariah, Adiwarman Azwar Karim dikenal dengan 3 pilar keuangan syariahnya. “Indonesia merupakan pasar besar untuk industri halal global,” ujar penulis lima buku *best seller* ekonomi Islam ini.



Arena.id

Nama Adiwarman Azwar Karim, Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia (KCI), sudah merupakan ikon ekonomi dan keuangan Syariah. Bergulat dengan ekonomi syariah di Indonesia sejak konsep ini dikenalkan pada pertengahan 1990-an, Adi dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2015-2020). Ia juga anggota International Islamic Financial Market (IIFM) Sharia Advisory Panel (Januari 2011-2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan Dewan Pengawas

Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank Danamon Syariah (2002-2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-2008), BNP Paribas Investment Partners (dahulu Fortis Investments) (2007- 2012) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing.

Adi merupakan salah satu perintis dan jajaran manajemen Bank Muamalat Indonesia, pelopor bank syariah di Indonesia. Tak heran jika ia sangat menguasai masalah keuangan syariah di Indonesia. Lima buku yang ditulisnya, yaitu *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, *Ekonomi Mikro Islami*, *Ekonomi Makro Islami*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, dan *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer*, semuanya menjadi buku laris. Ia juga menulis lebih dari 70 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional ke-3, ke-4, dan ke-5 yang disponsori oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Konferensi Tahunan International Western Economics Association ke-76.

Lulusan Institut Pertanian Bogor dan Fakultas Ekonomi UI, European University Belgium, dan Boston University, Amerika Serikat ini sempat menjadi *Research Associate* di Oxford Center Islamic Studies Inggris.

Berawal dari buku *Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam* yang ditulis dosennya di IPB, Prof. A.M. Saefuddin, Adi mulai tertarik mempelajari ekonomi Islam. Dosen *Marketing Manajemen* itulah yang mengenalkannya dengan Ekonomi Islam. “Bukunya tipis, tapi nonjok,” kata Adi.

Meski mulai rajin membeli beragam buku tentang ekonomi Islam, ia mengaku belum membacanya karena belum mengerti. Pasalnya, buku-buku ekonomi Islam dahulu agak sulit dipahami karena bukan memuat mengenai ekonomi melainkan terkait ayat Al Quran serta hadits.

Dirinya mulai lebih banyak membaca soal ekonomi Islam ketika pada 1990 mendapat beasiswa kuliah di Universitas Boston. Di sana ia menemukan banyak disertasi dan jurnal tentang ekonomi Islam. “Keren-keren, menggunakan analisis matematika, sehingga saya tambah percaya diri kalau ekonomi Islam bisa

diterangkan menggunakan bahasa ekonomi yang para ekonom biasa apresiasi,” kenang Adi.

Ketika mulai belajar mengenai ekonomi Islam, ia menemukan beberapa hal. Di antaranya, selalu ada keseimbangan antara sektor moneter dan riil dalam ekonomi syariah. “Jadi kalau ada uang pasti ada barang, sebaliknya pun begitu. Hal ini membuat ekonomi jadi stabil pertumbuhannya,” paparnya. Ekonomi Islam, kata dia, juga sangat tidak ingin ada intervensi harga. Dengan begitu, pasar dibiarkan bertemu pasokan dan permintaan. Meski kemudian, dikenal adanya intervensi pasar. Lebih lanjut, ia menerangkan dalam ekonomi Islam, sumber daya tidak didiamkan begitu saja. “Bila dibiarkan dan tidak dimanfaatkan akan terkena zakat yang besar,” katanya.

Adi menilai tak ada bisnis gagal bila dilakukan sepenuh hati. Menurutnya ada tiga pilar dalam keuangan syariah. Pilar pertama, keluarkan semua hal buruk dan tinggalkan semua keharaman. “Kita harus jujur pada Allah yang berarti *sidik*, dan kedua jujur pada manusia atau *amanah*,” katanya. Pilar kedua adalah cerdas. Menurutnya, cerdas terbagi dua, yaitu cerdas dalam meyakinkan orang lain (*tabligh*), dan cerdas memahami situasi (*fathonah*). Menurutnya, kejujuran tanpa kecerdasan tak akan berhasil, sehingga keduanya wajib ada. Pilar terakhir, yaitu memberikan pelayanan terbaik. Ia menjelaskan, bank syariah harus bisa memberikan pelayanan terbaik, agar semakin banyak masyarakat yang tertarik bertransaksi di sana.

Adi berpendapat, Indonesia merupakan pasar besar untuk industri halal global. Pada 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai

“

Kita bukan sekadar jadi pasar yang besar, tapi kita juga menjadi pemain kelas dunia yang terus menghasilkan pemain-pemain baru ”

Pada tahun 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai USD2,2 triliun dan akan terus berkembang hingga mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi dari *The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020*.

Indonesia berhasil menempati peringkat satu dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan skor 81,93. Berdasarkan *Global Islamic Finance Report 2019*, Indonesia berhasil naik lima peringkat dan menggeser Malaysia yang mengisi posisi tersebut selama tiga tahun sebelumnya. Laporan ini menyebutkan, naiknya peringkat Indonesia pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019* berkat dukungan pemerintah maupun pihak swasta. Mengutip majalah *Media Keuangan* terbitan Kemenkeu edisi Mei 2019, ekonomi syariah menyumbang USD3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Selain itu, ekonomi syariah juga mampu menarik USD1 miliar investasi asing secara langsung, serta membuka

127 ribu lapangan kerja baru setiap tahun.

“Dengan begitu, diharapkan Indonesia nantinya di tahun 2030 ketika sudah menjadi negara maju, menjadi lima besar dunia dari segi



wikipedia

ekonomi. Kita harapkan, kita bukan sekadar jadi pasar yang besar, tapi kita juga menjadi pemain kelas dunia yang terus menghasilkan pemain-pemain baru,” kata Adi.

Adrian Asharyanto Gunadi,

AFPI Ciptakan Layanan Keuangan Digital yang Inovatif



Memimpin AFPI periode 2018-2023, Adrian Asharyanto Gunadi berupaya melanjutkan komitmen untuk menjadikan *fintech lending* sebagai pilihan layanan dan mengoptimalkan akses pendanaan kepada masyarakat melalui daring, khususnya di masa pandemi.

Sukses memimpin Investree, Adrian Asharyanto Gunadi juga memimpin AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) sejak Juni 2018 dan saat ini memasuki periode ke-2. Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1976 ini telah malang melintang di dunia perbankan, Adrian sempat bekerja di Standard Chartered Bank dan menjabat sebagai *Product Structuring* (2005-2007). Selain fasih pada dunia perbankan konvensional, ia juga menguasai perbankan syariah dengan menjadi *Head of Sharia Banking* PT Bank Permata Tbk (BNLI) (2007-2009). Karirnya semakin menanjak

dengan menjadi *Managing Director Retail Banking* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (2009-2015). Bank Muamalat merupakan *retail banking* syariah terbesar kedua di Indonesia dengan *market share* lebih dari 35%. Setelah belasan tahun berkecimpung di dunia perbankan, ia memutuskan membangun bisnisnya sendiri di bidang keuangan dengan mendirikan PT Investree Radhika Jaya atau Investree pada 2015, sekaligus sebagai *Co-Founder & CEO* perusahaan *fintech lending* ini. Di sini ia berkolaborasi dengan profesional perbankan berpengalaman, Dr Amiruddin sebagai *Co-Founder & Commissioner*.

Dengan pengalaman di dunia *fintech lending* yang tak diragukan, pada 2018 ia terpilih sebagai ketua AFPI hingga kini. Asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjaman

uang berbasis teknologi informasi ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2018 dan diresmikan oleh OJK melalui surat nomor S-5/D.05/IKNB/2019. Pembentukan AFPI dilatarbelakangi oleh perkembangan *fintech* di Indonesia yang sangat pesat dan positif sehingga membuat banyak orang memilih *fintech* untuk layanan transaksinya. Teknologi yang semakin maju turut serta menunjang perkembangan industri *fintech lending* seiring perubahan perilaku masyarakat ke arah digital. Industri baru ini dinilai menjadi solusi tepat dan cepat untuk masalah pembiayaan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan dan turut meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Di masa pandemi ini, AFPI menghadapi tantangan sebagaimana juga dialami oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan yakni kredit macet, yang diakibatkan oleh ekonomi debitur terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Untuk itu, AFPI bersama dengan OJK menerapkan sejumlah strategi dan langkah mitigasi menekan rasio kredit bermasalah (Tingkat Wanprestasi Keberhasilan Pengembalian Pinjaman/TWP) pada *fintech lending*, salah satunya dengan meningkatkan manajemen risiko kredit, terutama pada pembiayaan baru, meliputi peningkatan kualitas penilaian kredit hingga kualitas pengenalan calon konsumen (*Know Your Customer/KYC*).

AFPI membentuk gugus tugas manajemen risiko yang didukung oleh adanya *Fintech Data Center* (FDC) dari manajemen risiko, yang bertujuan untuk mendorong AFPI memperkuat manajemen risiko kredit untuk menekan tingkat kredit bermasalah.

Selain itu, AFPI juga berencana meraih dukungan dari pihak ketiga yakni asuransi penjaminan kredit sehingga kredit bermasalah bisa diantisipasi dengan menjaminkan kredit tersebut. "Melalui berbagai upaya tersebut, saya yakin rasio kredit bermasalah bisa dikurangi secara sistematis," kata Adrian.

Adrian yakin bisnis *fintech lending* meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan sedemikian pesat, *fintech lending* menjadi sarana untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal (*unbanked society*). Asosiasi ini dapat berperan besar dalam meratakan ekonomi, khususnya untuk UMKM. World Bank mencatat *funding gap* sebesar Rp1.000 triliun per tahun. Pada tahun lalu industri *fintech lending* baru mengisi 6%. Kebutuhan yang sangat besar terhadap *fintech lending* membuat industri ini terus tumbuh.

Menurut Adrian, AFPI akan melanjutkan komitmen untuk menjadikan *fintech lending* sebagai pilihan layanan dan mengoptimalkan akses pendanaan kepada masyarakat secara daring, khususnya di masa pandemi ini. "Kami berharap situasi ini menjadi momentum era digitalisasi, khususnya *fintech lending*, untuk berperan lebih dan ambil bagian dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

AFPI akan mendorong penyelenggara *fintech lending* untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi yang solid dengan seluruh mitra

strategis melalui *road map* yang lebih jelas terkait pengembangan industri, misalnya kolaborasi dengan institusi keuangan seperti perbankan (Bank Umum dan BPR) untuk mendukung pemulihan sektor usaha mikro dan kecil.

Hal ini sejalan dengan harapan regulator untuk menciptakan layanan keuangan digital yang inovatif namun tetap memastikan kemampuan mitigasi risiko yang mumpuni. Oleh sebab itu layanan digital menjadi preposisi keunggulan *fintech lending* yang dapat turut mendukung peningkatan layanan keuangan di masyarakat.

Hingga saat ini penyaluran pendanaan para pelaku *fintech lending* Indonesia didominasi sektor produktif 68%, konsumtif 58%, dan syariah 7%. Penyaluran pembiayaan *fintech lending* dilakukan melalui *platform* digital dengan proses yang lebih sederhana dan cepat sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat serta lebih fleksibel ketika terjadi pandemi yang mengurangi kontak fisik.

"Saya optimis kepengurusan AFPI periode 2020-2023 ini akan memberikan semangat baru bagi industri *fintech lending* dan para anggotanya untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan peran *fintech lending* yang lebih luas serta dapat menjadi bagian dari ekosistem digital dengan menasar masyarakat yang belum terlayani (*underserved*) dan UMKM yang belum tersentuh bantuan (*underpenetrated*) permodalan sektor perbankan," kata Adrian optimis.

OJK Perpanjang Masa Restrukturisasi Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 selama setahun. Relaksasi yang sebelumnya bakal berakhir Maret 2021 tersebut masih akan berlaku hingga Maret 2022.



OJK memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun, terhitung sejak Maret 2021 menjadi Maret 2022. Perpanjangan itu dilakukan setelah memperhatikan asesmen terakhir yang dilakukan OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana

memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 23 September 2020.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan restrukturisasi ini dilakukan OJK sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur

restrukturisasi. Namun keringanan tersebut tetap dilakukan secara selektif.

OJK tengah memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain mengenai pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam enam bulan terakhir menunjukkan kenaikan. "Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi, kami perpanjang lagi sampai Maret 2022," papar Wimboh.

Laporan OJK menyebutkan hingga 5 Oktober 2020 nilai realisasi restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur. Sementara itu, restrukturisasi pembiayaan multifinance hingga 27 Oktober 2020 mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak.

Wimboh Santoso menjelaskan, dari total restrukturisasi kredit sebesar Rp914,65 triliun itu terdiri dari UMKM senilai Rp361,98 triliun (5,88 juta debitur) dan non-UMKM senilai Rp552,69 triliun (1,65 juta debitur). Sejauh ini OJK menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang dilakukan, termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan.



Menjadikan Hari Asuransi sebagai Momentum Industri Asuransi

Tanggal 18 Oktober 2020 ditetapkan sebagai Hari Asuransi (*Insurance Day*). Penetapan ini diharapkan menjadi momentum titik balik pertumbuhan industri asuransi nasional agar dapat menyejajarkan posisinya setara industri keuangan lainnya.

Dibandingkan industri keuangan lainnya, industri asuransi dapat dikatakan agak tertinggal, lebih-lebih dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang menerpa hampir setahun belakangan ini. Menghadapi berbagai tantangan di era kenormalan baru (*new normal*), industri perbankan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan fokus memberikan layanan terdigitalisasi yang sudah dimulai sejak jauh sebelum pandemi merebak. Bahkan situasi pandemi menjadi pemacu untuk menerapkan layanan

berbasis teknologi informasi, yang mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis di tengah kendala.

Namun tidak demikian halnya dengan industri asuransi. Memang, seperti juga industri perbankan, industri asuransi pun sejak beberapa tahun terakhir sudah menerapkan digitalisasi dalam proses bisnis, baik untuk kebutuhan operasional, layanan, maupun pemasaran. Sejumlah perusahaan asuransi sudah memiliki aplikasi yang memudahkan nasabah mengakses informasi mengenai produk

asuransi yang dibeli, bahkan hingga ke proses klaim. Namun faktanya tidak semua perusahaan asuransi bisnisnya berjalan baik. Sejumlah perusahaan asuransi masih dibelit masalah, meski sejumlah perusahaan asuransi lainnya tumbuh semakin berkibar. Menurut catatan OJK, sampai Agustus 2020 lalu asuransi jiwa telah membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp92,97 triliun, dengan pendapatan premi Rp109,60 triliun. Asuransi umum telah membayar klaim sebesar Rp23,80 triliun, dengan premi sebesar Rp43,99 triliun.

Pertumbuhan usaha ini masih dapat dipacu mengingat kini kesadaran akan pentingnya berasuransi kian tumbuh, khususnya untuk asuransi pendidikan dan kesehatan. Menilik 3 (tiga) tahun lalu, industri asuransi tergolong cukup menuai tren positif setiap tahunnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menunjukkan pada 2017 total pendapatan premi meningkat 17,2% menjadi Rp195,72 triliun. Untuk 2018 dan 2019 hasil kajian dari Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) menunjukkan pendapatan kotor premi industri asuransi umum di tahun 2019 tumbuh 15% year on year (yoy), dari Rp56,18 triliun pada 2018 menjadi Rp64,62 triliun pada 2019.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merangkap Anggota Dewan Komisier OJK, Riswinandi, situasi pandemi merupakan momentum bagi industri asuransi untuk beradaptasi memanfaatkan teknologi guna mendukung proses bisnis perusahaan, baik dalam menjangkau nasabah baru atau sekadar interaksi dengan nasabah perusahaan. "Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Menurutnya salah satu mitigasi risiko yang perlu dilakukan secara optimal adalah proses pemasaran yang dikaitkan dengan *platform* digital. OJK sedang menyiapkan dan merampungkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Hasilnya diharapkan segera selesai untuk mendukung kegiatan yang berbasis teknologi informasi di sektor IKNB. "Penetapan Hari Asuransi ini dapat menjadi momentum dan titik balik untuk perbaikan industri asuransi," ujar Riswinandi.

Mengenal Saham Go-Cap

Di antara saham-saham *blue chip* bernilai besar yang menjadi incaran para investor, ada saham *go-cap* alias *penny stock*, yakni saham-saham yang harganya di kisaran Rp50 per saham. Bagaimana peluang saham recheh ini untuk investasi?

Tidak semua saham yang ditawarkan di pasar modal berkapitalisasi besar, berharga tinggi, dan menjadi incaran investor seperti saham-saham *blue chip*. Ada juga saham-saham yang kapitalisasinya kecil dan harganya juga murah, di kisaran Rp50 per lembar atau Rp5.000 per *lot* (100 lembar). Inilah *penny stock*, atau dikenal juga dengan sebutan saham rechehan, saham kapitalisasi mikro (*micro-cap stock*), saham kapitalisasi nano (*nano-cap stock*), atau saham *go-cap* karena harganya sekitar Rp50 per lembar tadi.

Berbeda dengan saham-saham keping biru yang dikeluarkan perusahaan besar dengan kinerja fundamental kemilau, memiliki kapitalisasi pasar yang besar, harganya tinggi, dan nilainya stabil sehingga banyak menjadi incaran investor, saham *go-cap* adalah saham-saham guram yang jarang menjadi incaran investor.

Saham guram umumnya terjadi karena jatuhnya kinerja fundamental perusahaan penerbit sahamnya. Kejatuhan ini bisa disebabkan industri tersebut terpuruk karena memasuki industri senja (*sunset industry*) dimana nilai komoditas yang dihasilkannya terus merosot, seperti halnya timah dan batu bara, atau karena salah urus (*miss-management*) perusahaan. Bisa saja saham guram ini berasal dari saham keping biru yang harga sahamnya terus tergerus hingga ke titik nadir, bahkan hingga Rp1 per lembar. Tapi ada juga saham *go-cap* yang diterbitkan perusahaan kecil dan kapitalisasi kecil, sehingga harga per sahamnya memang sejak awal terbilang rendah.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) kita temui saham *go-cap* dari perusahaan yang bergerak di beberapa bidang industri, mulai dari industri pertambangan

minyak dan gas, perkebunan, transportasi, hingga infrastruktur.

Karena kinerja perusahaannya jeblok, saham *go-cap* pada umumnya merupakan saham tidur yang jarang diperjual-belikan di pasar reguler sehingga tidak likuid. Harganya juga cenderung tidak bergerak sehingga secara normal investor sulit mengharapkan perolehan (*gain*) dari saham guram ini. Meski kerap disebut saham tidur, saham *go-cap* ini masih diperdagangkan di pasar negosiasi. Transaksi di pasar ini tidak lagi memperhitungkan kinerja fundamental perusahaan penerbitnya, melainkan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual yang sedang membutuhkan dana terpaksa melepas sahamnya dengan harga miring.

Saham *go-cap* ini tak jarang menjadi saham gorengan. Tanpa menunjukkan kinerja fundamental yang membaik, tiba-tiba saja sahamnya menjadi sangat aktif dan harganya membumbung. Biasanya diiringi hembusan cerita perusahaan tersebut akan direstrukturisasi atau tengah diincar investor potensial.

Pada saat itulah investor berspekulasi membelinya. Namun meski harganya rendah, investor pemula tidak direkomendasikan bermain saham *go-cap*, karena pergerakan harga saham gorengan cenderung liar tak terkendali. Bisa meroket dengan cepat dan terhempas tiba-tiba. Hanya spekulan kampion saja yang bermain di pasar fluktuatif ini.





Pagelaran Bulan Inklusi Keuangan 2020 Lampau Target

Di tengah situasi pandemi, kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang digelar sepanjang Oktober lalu mencatat pencapaian luar biasa. Diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir 2024.



EDWIN NURHADI
DIREKTUR PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN OJK

Sepanjang pagelaran Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 pada Oktober 2020, OJK telah menggelar kurang lebih 513 kegiatan dengan total peserta sebanyak 42.644. Adapun kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan sosialisasi tatap muka ataupun virtual (*webinar*), pembukaan rekening, penyaluran kredit/ pembiayaan mikro, *business matching* (temu bisnis), peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta aplikasi daring yang merupakan bagian dari program literasi dan inklusi keuangan secara masif.

Mengusung tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)" kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa keuangan di masyarakat.

Berbeda dengan tahun lalu BIK 2020 dipusatkan melalui portal

OJK bersama kementerian telah menginisiasi Oktober sebagai bulan inklusi keuangan," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Jakarta.

Edwin Nurhadi, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, menyatakan BIK tahun ini memang berbeda karena hampir 90% kegiatan dilakukan secara virtual. "Namun dari segi pencapaian targetnya sangat luar biasa," ujarnya. OJK menargetkan pembukaan rekening tabungan pelajar di seluruh Indonesia sebanyak 500.000 rekening dan pemberian kredit/ pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro sebesar Rp4,3 triliun. "Ternyata pencapaian BIK tahun ini untuk industri perbankan sebesar

website www.bik2020.id, karena pandemi Covid-19. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya pengunjung, yakni 27.090 orang yang mengunjungi situs tersebut selama kegiatan BIK 2020.

"Sejak 2016,

“

Bulan Inklusi Keuangan bertujuan selain memberikan edukasi keuangan yang tepat sasaran tentunya akan meningkatkan pemahaman terhadap industri jasa keuangan serta produk maupun layanannya

”

Rp35,51 triliun, dari total pembukaan 789.025 rekening tabungan di luar tabungan pelajar," tutur Edwin.

Pencapaian lainnya pun menggembirakan. Penyaluran kredit/ pembiayaan selama BIK dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pembiayaan UMKM/Ritel di daerah kepada 419.101 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp19,27 triliun. Sedangkan industri keuangan non bank yaitu asuransi, mencatat pembukaan polis sebanyak 44.758, pembukaan rekening sebanyak 41.142 untuk pasar modal, pembukaan rekening baru 10.667 pegadaian, dan pembukaan akun *fintech* sebanyak 82.135.

Sebagai rangkaian kegiatan penutupan BIK 2020, dilakukan peluncuran Aplikasi *Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)* yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU merupakan aplikasi daring berbasis teknologi *geospatial* yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan akses keuangan terlengkap di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan BIK ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dengan

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta memperluas akses keuangan di seluruh sektor keuangan, yakni perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, pergadaian, dana pensiun, *fintech*, dan *e-commerce*.

Edwin menambahkan, banyak faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan BIK tahun ini sehingga dapat melebihi target pembukaan rekening tabungan pelajar meski dalam kondisi pandemi.

Pertama, adanya dukungan dan partisipasi aktif Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Daerah (dinas terkait), dan pihak sekolah. "Dukungan ini sangat berpengaruh dalam pencapaian BIK tahun ini. Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu tercapainya target pembukaan rekening selama BIK 2020," ujarnya. Selain itu, adanya implementasi kebijakan untuk melaksanakan pembukaan rekening yang dilakukan secara kolektif baik melalui sekolah yang masih berjalan secara tatap muka ataupun yang melakukan proses pembelajaran secara daring.

Faktor lain ialah OJK dan LJK juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung melalui publikasi di berbagai media, *influencer*, dan penayangan iklan layanan masyarakat serta *webseries*. Kompetisi SimPel *Choreo* pun mendorong pelajar untuk mengetahui lebih dalam produk-produk tabungan anak.

Kegiatan BIK yang menjadi agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada Oktober setiap tahunnya ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan

layanan jasa keuangan. "Dengan demikian kegiatan ini akan memberikan dampak positif khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia," lanjutnya.

Horas V.M. Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK menambahkan, selain memberikan edukasi keuangan yang tepat sasaran BIK bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap industri jasa keuangan serta produk maupun

“
banyak faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan BIK tahun ini sehingga dapat melebihi target pembukaan rekening tabungan pelajar meski dalam kondisi pandemi.
 ”



HORAS V.M. TARIHORAN
 DIREKTUR LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN OJK

layanannya. Dengan begitu masyarakat akan tergugah untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. "BIK merupakan sebuah momen untuk mengajak masyarakat memanfaatkan promo dan diskon produk/layanan jasa keuangan yang diselenggarakan selama bulan Oktober, dengan begitu masyarakat memiliki pilihan lebih bervariasi," ujarnya.

Kegiatan penguatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir 2024.

Perkembangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pada pertengahan Maret lalu OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi langsung lancar, penetapan kualitas aset satu pilar, relaksasi ketentuan kewajiban pencadangan PSAK 71. Kebijakan tersebut ditopang oleh pemberian subsidi bunga bagi UMKM dan pelaku usaha ultra mikro oleh Pemerintah.

Selama masa pandemi Covid-19, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Kebijakan stimulus tersebut selain untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga berfungsi untuk menempatkan industri jasa keuangan sebagai katalisator dalam menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan daya dukung bagi sektor riil.

Sejak diluncurkan pada 16 Maret hingga 26 Oktober 2020, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp932,4 triliun dari 7,53 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM senilai Rp369,8 triliun yang berasal dari 5,84 juta debitur. Untuk non-UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,69 juta debitur dengan nilai Rp562,5 triliun.

Untuk perusahaan pembiayaan, per 17 November 2020, OJK mencatat 183 perusahaan pembiayaan sudah menjalankan restrukturisasi pinjaman tersebut. Realisasinya, sudah disetujui sebanyak 4,87 juta kontrak dengan total nilai mencapai Rp181,3 triliun.

“OJK juga mendukung program Pemerintah dalam mengeluarkan skema penjaminan kredit UMKM dan korporasi, serta program penempatan dana Pemerintah ke industri perbankan untuk mendukung penyaluran kredit

kepada UMKM dan Korporasi Padat Karya yang akan dapat mempercepat Bergeraknya aktivitas dunia usaha,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso.

Sebelumnya, Pemerintah menempatkan dana negara di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan alokasi Rp47,5 triliun yang mampu mendorong penyaluran kredit mencapai Rp198,85 triliun per November 2020. Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah telah menerima penempatan dana sebesar Rp14 triliun

yang telah mendorong penyaluran kredit sebesar Rp22,79 triliun. Selain itu, bank syariah mendapatkan Rp3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp5,54 triliun.

Selanjutnya, dengan melihat adanya kebutuhan dari industri dan pencapaian pemulihan dari dunia usaha yang masih memerlukan dukungan, OJK melakukan perpanjangan restrukturisasi langsung lancar dan penetapan kualitas kredit/pinjaman satu pilar hingga Maret 2021.



Kian Kreatif di Tengah Pandemi

Di tengah himpitan dampak Covid-19, masyarakat pantang menyerah. Menyempitnya peluang kerja formal di perkantoran, membuat ide-ide kreatif dan inovatif untuk berbisnis *online* bermunculan, dari berbagai produk dan layanan jasa yang ditawarkan secara daring.

Pandemi Covid-19 membuat banyak karyawan dirumahkan entah sampai kapan. Ketika lapangan pekerjaan menyempit karena aktivitas perkantoran dan bisnis berkurang drastis menyebabkan sebagian karyawan dirumahkan, namun demikian banyak yang dengan tegar beralih menjadi pekerja mandiri atau wirausaha.

Kata kunci untuk sukses bertransformasi ke kuadran

ketiga ini – meminjam istilah Robert T. Kiyosaki – adalah kreativitas, mau bekerja keras, dan pantang gengsi. Ketiganya adalah syarat mutlak menjadi wirausahawan tangguh. Tentu saja modal juga hal yang penting, tapi bukan yang utama karena usaha dapat dimulai dari skala kecil, bahkan mikro sehingga tidak membutuhkan modal dalam jumlah besar.

Usaha yang paling banyak dilakoni selama pandemi adalah usaha kuliner.

Inilah usaha yang tak ada matinya, karena setiap saat orang butuh makan dan minum. Selain itu, modal yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan skala usahanya.

Bisnis lain yang tahan krisis adalah pengadaan kebutuhan pokok (sembako) dan sayur-mayur. Namun karena dalam situasi pandemi ini masyarakat membatasi ke luar rumah, maka banyak orang lebih suka bertransaksi secara daring. Tak heran jika bisnis perdagangan daring justru semakin bersinar di masa kenormalan baru. Permintaan barang-barang ritel melalui *platform e-commerce* terus melonjak. Kondisi ini mendorong pelaku UMKM terjun ke usaha daring dan bergabung dengan toko daring (*marketplace*) yang sudah ada atau membangun toko daringnya sendiri.

Selain produk-produk yang telah hadir sebelumnya, pandemi juga menumbuhkan sejumlah usaha produksi alat pelindung diri untuk menangkal penyebaran virus, seperti masker, *face shield*, *hand sanitizer*, sarung tangan, jaket, dan baju *hazmat* (APD). Di tangan orang-orang kreatif, masker dan *face shield* bahkan dapat menjadi tren fashion tersendiri. Lihat saja berbagai masker batik, tenun ikat, atau motif-motif lain yang menarik.

Dampak tumbuhnya perdagangan daring adalah maraknya usaha jasa pengantaran – mulai dari yang mengandalkan sepeda motor hingga mobil barang. Inovasi, kreativitas, dan kerja keras merupakan kunci sukses berusaha. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.



Pentingnya Keamanan Digital dalam Inovasi *Fintech*

Inovasi di bidang teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan keamanan digital akan menjadi kontraproduktif. Oleh sebab itu inovasi-inovasi di bidang keamanan digital perlu terus digulirkan.

Perkembangan teknologi tak hanya mempermudah hidup setiap orang dalam menjalankan berbagai aktivitas, namun juga memungkinkan negara mengembangkan potensi ekonomi digitalnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi digital yang menjanjikan. Laporan Google, Temasek, dan Bain Company pada 2019 menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Hal ini divalidasi dengan laporan terkini dari Facebook dan Bain pada 2020 yang menyebutkan, persentasi konsumen digital Indonesia telah meningkat 10%, menjadi 68% dibandingkan 2019. Kondisi pandemi Covid-19 turut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan industri digital di Indonesia, mengakibatkan masyarakat kini kian bergantung kepada internet.



Di sisi lain, perkembangan potensi ekonomi digital yang berkembang dibarengi dengan isu keamanan serta potensi modus kejahatannya. Di sinilah pentingnya keamanan digital dalam teknologi finansial.

Menurut Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Dino Milano Siregar, *platform* yang aman akan membuat masyarakat semakin nyaman mememanfaatkannya. "OJK selalu mendorong para pelaku teknologi finansial untuk terus berinvestasi dan berinovasi di bidang ini," ujarnya.

Keamanan digital harus selaras dengan peningkatan literasi keamanan bagi masyarakat luas di sektor teknologi finansial. Hal tersebut bisa menjadi kunci dalam mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia. Inovasi layanan sangat penting dalam memastikan pengalaman terbaik bagi pengguna saat bertransaksi secara daring.

Hanya saja, banyaknya modus yang kemudian memunculkan kejahatan melalui teknik rekayasa sosial atau Manipulasi Psikologis (Magis) yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh dalam upaya meningkatkan kompetensi keamanan digital masyarakat sebagai pengguna agar mereka semakin aman dan nyaman dalam beraktivitas digital.

Digitalisasi perbankan saat ini sudah berjalan selama tiga tahun terakhir dan semakin cepat pertumbuhannya saat masa pandemi Covid-19. "Transformasi perbankan



ke arah digital semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, dan efisien serta memperlancar arus perputaran keuangan," ungkap Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto.

Dalam pengembangan perbankan digital terdapat dua isu utama yang perlu diperhatikan semua pihak, yakni aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

OJK sangat mendukung digitalisasi dilakukan melalui empat strategi utama. Strategi tersebut yakni akselerasi digitalisasi perbankan, penguatan infrastruktur akselerasi digitalisasi, penguatan manajemen risiko terkait risiko siber, dan edukasi keamanan teknologi informasi baik kepada pelaku sektor jasa keuangan maupun nasabah.

Keempat strategi tersebut perlu dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mendorong akselerasi digitalisasi perbankan dalam memberikan layanan yang lebih baik

bagi nasabah. "Digitalisasi sektor keuangan khususnya perbankan bukan lagi menjadi sebuah pilihan, namun telah menjadi keniscayaan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong akselerasi inklusi keuangan," ujar Anung.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, menjelaskan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis. Tirta mengharapkan hal tersebut bisa menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Tirta menuturkan, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan diiringi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan mendorong masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, membangun kompetensi keamanan teknologi digital yang baik, merupakan hal yang harus mendapat perhatian serius.



Resolusi Keuangan 2021 di Tengah Pandemi Covid-19

Apakah Anda sudah menyiapkan resolusi keuangan 2021? Atau bahkan belum pernah membuat pengelolaan keuangan? Sebaiknya Anda mulai memikirkannya, apalagi di era yang tak menentu seperti sekarang.

Pandemi Covid-19 masih terjadi hingga saat ini di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Covid-19 memberi dampak luar biasa di segala sektor terlebih sektor ekonomi, bahkan merontokkan perekonomian global dan menyebabkan resesi ekonomi di banyak negara. Karena itulah, di saat perekonomian terguncang, masyarakat diimbau untuk cerdas atur keuangan, seperti stop kebiasaan *impulsive buying* agar dompet tetap sehat di

tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

Menyambut 2021 di akhir tahun ini adalah momen yang tepat untuk Anda membenahi pengelolaan keuangan yang mungkin sempat berantakan selama 2020 ini akibat pandemi. Ya, resolusi keuangan wajib masuk dalam daftar '*to do list*' Anda untuk tahun depan. Mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan bagaimana pengelolaan keuangan Anda untuk

setahun penuh. Namun, setelah terjadi hantaman besar sektor ekonomi akibat pandemi, tampaknya urusan pengelolaan keuangan tidak boleh lagi diabaikan.

Perencana Keuangan, Agustina Fitria menyarankan mereka yang mengalami dampak pandemi mencanangkan resolusi untuk menata kembali kondisi keuangannya di tahun depan. Mereka yang selama pandemi sudah menggerus dana darurat, mulai

tahun depan harus mengisi lagi pundi-pundi dana daruratnya. Caranya cukup sederhana tidak serumit yang Anda duga. Kuncinya, teliti dan konsisten.

Evaluasi

Langkah awal agar tahun depan Anda bisa mengeksekusi resolusi keuangan Anda dengan baik, Anda perlu melakukan evaluasi terhadap



pengelolaan keuangan selama 2020 ini. Periksa semua aset Anda. Bukan hanya tanah atau properti saja, tetapi seluruh investasi Anda seperti reksa dana, saham, obligasi, emas, hingga simpanan di bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Hitunglah berapa besar pertumbuhannya dalam kurun waktu hampir enam bulan terakhir ini. Lalu, cek semua daftar utang Anda dan tanggal jatuh temponya, baik utang konsumtif maupun utang produktif.

Cara ini, menurut Freddy Tedja, *Investment Specialist*, untuk mengetahui jumlah *real* harta yang Anda miliki. "Periksa apakah jumlah harta yang dimiliki, yakni total aset dikurang total utang, bertambah atau berkurang selama pandemi ini," terang Freddy.

Klasifikasi

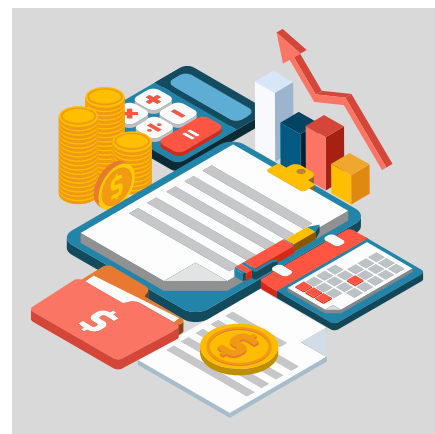
Kelompokkan resolusi keuangan Anda untuk tahun depan berdasarkan



evaluasi Anda. Masukkan masing-masing ke dalam kelompoknya, mana yang sudah tercapai, yang mungkin masih bisa dicapai tahun ini, dan mana yang sebaiknya ditunda dulu. "Untuk memutuskan resolusi keuangan masuk ke dalam kategori yang mana, perhatikan harta yang sudah terkumpul selama periode sekitar enam bulan terakhir," lanjut Freddy. Perhatikan tingkat urgensinya dan besaran penghasilan Anda saat ini. Ingat, pandemi ini belum jelas kapan akan berakhir. Sementara penghasilan sangat mungkin berkurang. Jika ternyata jumlah utang Anda masih besar, maka jadikan pelunasan utang sebagai resolusi keuangan yang baru. Sementara resolusi keuangan yang sifatnya hiburan, misal liburan atau membeli *home theater* baru, sebaiknya ditunda dulu. Sesuaikan saja resolusi keuangan Anda secara lebih realistis, namun harus tetap spesifik dan terukur.

Estimasi

Perkirakan mulai dari sekarang berapa dana yang akan Anda sisihkan untuk keperluan menabung dan mengisi pos dana darurat. Jumlahnya disesuaikan dengan penghasilan bulanan Anda setelah kebutuhan utama sehari-hari sudah terpenuhi. Meski sedikit Anda tetap harus mengisi pos ini, sebab dana darurat dan tabungan dapat



menyelamatkan Anda saat terdesak. Mungkin Anda bisa memulai ambil tabungan berjangka dan manfaatkan fitur autodebet agar menabung dana darurat jadi lebih konsisten.

Eksekusi

Berkomitmenlah terhadap resolusi keuangan yang sudah Anda buat. Lakukan evaluasi periodik setiap tiga bulan sekali, agar jika terjadi penyimpangan dapat cepat ditangani. Namun, di tengah kondisi seperti saat



ini, Anda juga boleh melakukan *review* setiap bulan. Ingatlah untuk selalu memisahkan keinginan dari kebutuhan dan tahu bagaimana memprioritaskan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebab kebanyakan orang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik karena gagal memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan.

OTORITAS JASA KEUANGAN

mengucapkan



— SELAMAT —

NATAL

25 DESEMBER 2020



**TAHUN
BARU 2021**



sikapiuangmu.ojk.go.id



@SikapiUangmu